



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/KEPMEN-KP/2014

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TAMAN WISATA PERAIRAN
LAUT BANDA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2014-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Taman Wisata Perairan Laut Banda di Provinsi Maluku, perlu menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Laut Banda di Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Laut Banda di Provinsi Maluku Tahun 2014 - 2034;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TAMAN WISATA PERAIRAN LAUT BANDA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 - 2034.
- KESATU : Menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Laut Banda di Provinsi Maluku Tahun 2014-2034, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Rencana Pengelolaan dan Zonasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan panduan operasional pengelolaan Taman Wisata Perairan Laut Banda di Provinsi Maluku.
- KETIGA : Rencana Pengelolaan dan Zonasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2014

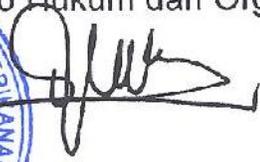
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/KEPMEN-KP/2014
TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI
TAMAN WISATA PERAIRAN LAUT BANDA DI
PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 - 2034

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambahan populasi manusia dan meningkatnya ancaman kerusakan alamiah akibat pemanasan global menjadikan fungsi ekologis dan sosial ekonomi berbagai wilayah perairan semakin rentan. Fenomena ini nampak jelas dengan semakin meningkatnya aktivitas penangkapan ikan dan aktivitas ekonomi lainnya tidak lagi dapat mendatangkan hasil yang semakin bermanfaat bagi manusia (fenomena *diminishing return*). Bahkan pencapaian kesejahteraan manusia semakin jauh dari yang diharapkan. Akibatnya, menurunnya produktivitas wilayah perairan karena pemanfaatannya yang ekstraktif telah melebihi daya dukung lingkungan yang dimiliki wilayah perairan tersebut.

Taman Wisata Perairan (TWP) Laut Banda merupakan salah satu Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.69/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Banda di Provinsi Maluku. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dari Departemen Kehutanan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor: BA.01/Menhut-IV/2009– BA.108/MEN.KP/III/2009 tanggal 4 Maret 2009, kawasan konservasi Laut Banda selanjutnya dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nomenklatur kawasan berubah menjadi Taman Wisata Perairan Laut Banda.

Dalam rangka mengembangkan kawasan Taman Wisata Perairan Laut Banda agar memberikan manfaat yang besar secara ekologis dan ekonomis, diperlukan suatu arahan pengelolaan yang komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu, perlu disusun rencana pengelolaan jangka panjang TWP Laut Banda, untuk selanjutnya dapat dijabarkan menjadi rencana jangka menengah dan tahunan. Proses penyusunan ini harus melibatkan para pihak ditingkat pusat dan daerah sehingga dokumen yang dihasilkan dapat menjembatani kepentingan dan aspirasi pemerintah dan masyarakat di seluruh tingkatan. Selain itu, diperlukan penguatan dukungan terhadap pengembangan Kawasan

Konservasi Perairan tersebut berupa penataan zonasi, yang harus ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis geografis serta pemetaan di lapangan maka ditemukan beberapa perbedaan yang termuat dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.69/MEN/2009 yaitu antara titik kordinat, gambar, dan luas kawasan TWP Laut Banda. Berkenaan dengan hal tersebut maka titik koordinat kawasan mengalami perubahan sehingga sesuai dengan luas kawasan dan gambar dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.69/MEN/2009 tersebut.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kawasan yang efektif dan berkelanjutan, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN) Kupang selaku Unit Organisasi Pengelola kawasan tersebut menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) TWP Laut Banda dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RPZ TWP Laut Banda adalah sebagai acuan dan panduan dalam:

1. pelaksanaan program dan kegiatan;
2. perlindungan dan pelestarian kawasan;
3. pemanfaatan kawasan sesuai dengan zonasinya; dan
4. mengevaluasi efektifitas pengelolaan kawasan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Laut Banda ini meliputi:

1. Potensi dan permasalahan meliputi kondisi biofisik, sosial, ekonomi, budaya dan permasalahan yang terkait dengan pengelolaan Taman Wisata Perairan (TWP) Laut Banda;
2. Kebijakan Pengelolaan meliputi landasanf hukum, kebijakan nasional dan kebijakan daerah;
3. Penataan zonasi kawasan meliputi penetapan zonasi dan aturan yang berlaku dalam zonasi; dan
4. Rencana pengelolaan meliputi rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan jangka menengah.

BAB II

POTENSI DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN

A. Potensi

Potensi yang terdapat di TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya meliputi potensi ekologi, potensi ekonomi, dan potensi sosial budaya. Ketiga potensi ini merupakan modal dalam pengelolaan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga potensi tersebut.

1. Potensi Ekologis

a. Ekosistem Pesisir dan Laut

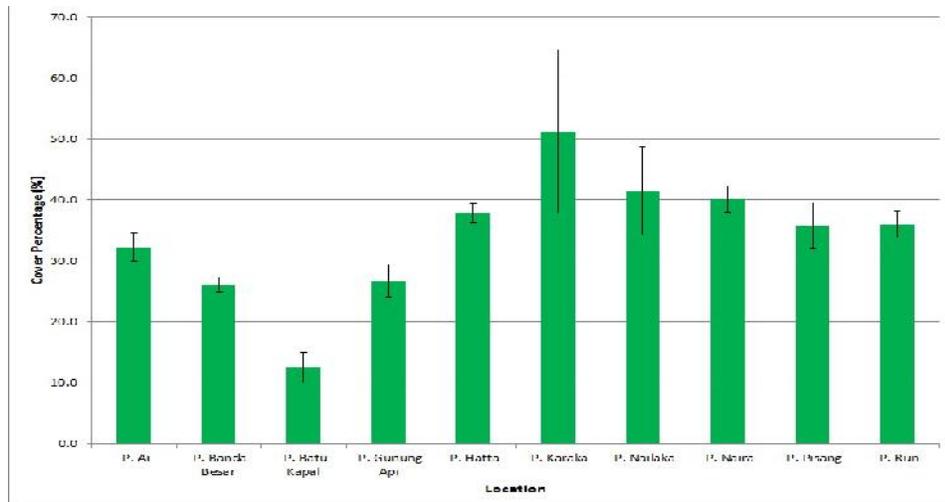
1) Ekosistem Terumbu Karang

Pada umumnya terumbu karang yang didapati di perairan kepulauan Banda adalah karang tepi dengankarakteristik *oceanic reefs*. Terumbu karang terbuka dan dipengaruhi oleh energi gelombang besarsepanjang tahun dari arah barat dan timur kepulauan Banda. Ini mengakibatkan rendahnya variasiterumbu karang yang ada di perairan kepulauan Banda.

Terumbu karang di perairan Kepulauan Banda umumnya adalah *reef flat* yang relatif sempit dengan kemiringan (*slope*) yang landai. Umumnya *reef flat* didapati dengan dasar karang mati tanpapertumbuhan karang. Hal ini disebabkan sebagian besar *reef flat* muncul ke diatas permukaan air padasaat surut. Pasang surut di kepulauan Banda berkisar antara 2 – 3 meter.

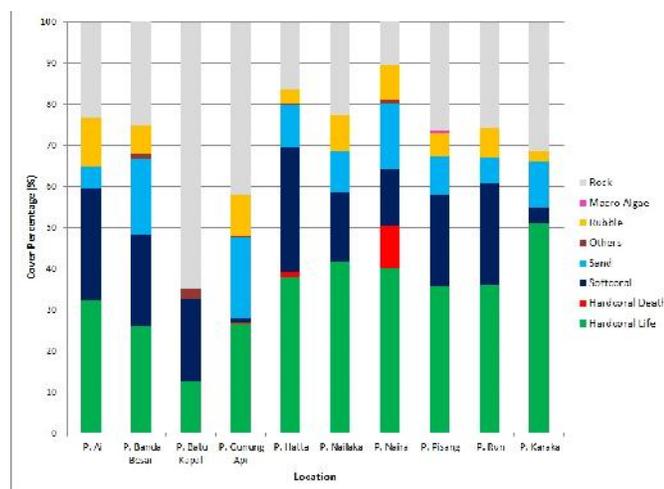
Jenis terumbu karang yang dominan adalah jenis *soft coral* dari marga: *Sarcophyton*, *Lobophytum*, dan *Sinularia*. Variasi komunitas karang di tentukan oleh tingkat keterbukaan dari energi gelombang yang diterima. Formasi pertumbuhan *massive* dan *encrusting* (merayap) didapati di daerah yang terbuka. Sedangkan di daerah yang sedikit tertutup, formasi pertumbuhan yang didapati adalah dari jenis *branching* seperti *Diploastrea heliopora* dan *Acropora palifera*. Di lokasi yang terlindung di dominasioleh Acropora dengan bentuk pertumbuhan *tabulate* dan *abrorecents*. *Coralline algae* dan pertumbuhan dengan format *encrusting* seperti Montipora, Cyphastrea, Leptoseris, Pavona, Leptastrea, dan Porites pada umumnya didapati pada kedalaman 2–5 meter didaerah terbuka. Pada kedalaman 10 meter atau lebih, format

pertumbuhan dalam bentuk foliosadengan marga Echinophyllia, Echinophora, Mycydium, dan Turbinaria juga banyak ditemukan. Walaupun terletak di pusat keanekaragaman hayati dunia untuk terumbu karang, keanekaragaman terumbu karang di Kepulauan Banda relatif rendah. Berdasarkan inventarisasi jenis – jenis karang batu pada kedalaman 2–15 meter, ditemukan sebanyak 17 famili, 63 genus dan 223 jenis. Tutupan Karang Keras Hidup di Kepulauan Banda sebagaimana tersebut pada gambar 8.



Gambar 8. Hasil Mantatow Tutupan Karang Keras Hidup di Kepulauan Banda. (Sumber: Hasil Mantatow 2012, CTC dan Satker TWP Laut Banda).

Tutupan Karang Keras yang ada di Kepulauan Banda relatif rendah bukan berarti kondisi tutupan karang di pulau tersebut kurang baik akan tetapi karena adanya tekanan dari aktivitas manusia. Khususnya di daerah pulau yang berpenghuni. Aktivitas manusia berupa pengambilan karang dan pasir sebagai bahan bangunan. Persentase tutupan karang sebagaimana tersebut pada gambar 9.



Gambar 9. Persentase Tutupan Karang Hidup, Soft Coral dan Abiotik Serta Tutupan Lain-Lain (Macro Algae, Karang Mati dan Lain-Lain) Di Kep. Banda (Sumber: Hasil Mantatow 2012, CTC dan Satker TWP Laut Banda).

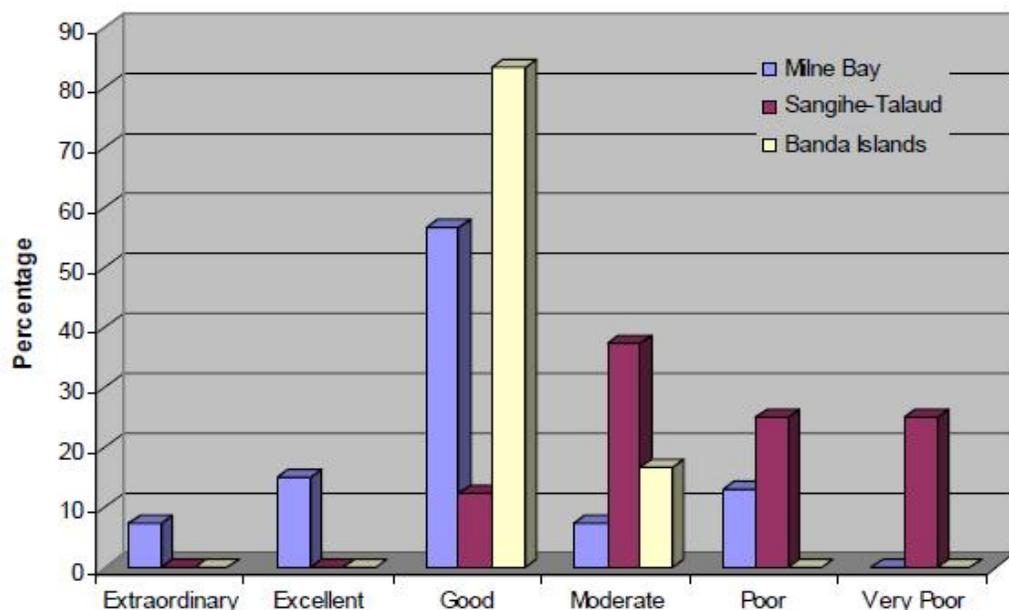
Dari hasil Mantatow didapatkan rata-rata persentase tutupan karang hidup dalam kawasan TWP Laut Banda sekitar 32.25 %, Soft Coral sekitar 14,5 % dan karang mati sekitar 2,75 %. Dari data tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan kondisi ekosistem terumbu karang di TWP Laut Banda masih masuk dalam kategori baik serta merupakan habitat yang baik bagi jenis ikan karang. Pada beberapa tempat terjadi kerusakan akibat aktivitas manusia akan tetapi hal tersebut dapat diminimalisir dengan memberikan pengetahuan tentang pentingnya ekosistem terumbu karang.

Untuk keanekaragaman hayati ikan karang di Kepulauan Banda telah dilakukan oleh salah satu LSM internasional yang berkonsentrasi kepada pelestarian dan perlindungan laut pada tahun 2002 (Survei REA). Survei tersebut dilakukan pada 18 lokasi penyelaman dengan waktu penyelaman SCUBA kombinasi sekitar 22,5 jam. Rata-rata observasi visual terhadap keanekaragaman spesies dilakukan di tiap-tiap lokasi selama 75 menit. Pengamatan dimulai pada kedalaman maksimal 45 m, dan waktu survei dikonsentrasikan pada kedalaman di atas 12 m di mana biasanya keanekaragaman hayatinya sangat tinggi.

Hasil dari survei tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan ditemukan sebanyak 500 spesies ikan dari 50 famili. Apabila diurutkan dari yang paling sedikit yaitu *damsel fishes (Pomacentridae)*, *wrasses (Labridae)*, *butterflyfishes (Chaetodontidae)*, *surgeonfishes (Acanthuridae)*, *groupers (Serranidae)*, *parrotfishes (Scaridae)*, *cardinal fishes (Apogonidae)*, *squirrelfishes (Holocentridae)*, *snappers (Lutjanidae)* dan *angel fishes (Pomacanthidae)*. Kesepuluh famili ikan ini menempati 70% dari total seluruh ikan yang dilaporkan terlihat. Lokasi-lokasi yang banyak tempat berlindungnya, yang banyak didominasi oleh karang keras biasanya keanekaragamannya kurang dari pada daerah-daerah yang terbuka yang biasanya keanekaragaman habitatnya sangat tinggi.

Indeks Keanekaragaman Ikan karang (*Coral Reef Fish Diversity Index/CRFDI*) digunakan untuk membandingkan Kepulauan Banda dengan daerah lain di Asia Pasifik. Hasilnya menunjukkan bahwa kepulauan Banda lebih kecil jika

dibandingkan dengan daerah lainnya keanekaragamannya sangat tinggi, merefleksikan tingginya nilai pelestarian dari kepulauan yang kecil ini. Indeks Keanekaragaman Ikan karang digunakan untuk membandingkan Kepulauan Banda dengan daerah lain di Asia Pasifik. Hasilnya menunjukkan bahwa mengingat kecilnya wilayah permukaan kepulauan Banda, keragaman ini adalah sangat tinggi, mencerminkan betapa pentingnya nilai pelestarian untuk kepulauan ini. Perbandingan nilai indeks keanekaragaman ikan karang yang ditemukan Kepulauan Banda sebagaimana tersebut pada gambar 10.



Gambar 10. Perbandingan Nilai Indeks Keanekaragaman Ikan Karang Yang Ditemukan Kepulauan Banda Dengan Beberapa Lokasi Lainnya Di Asia Pasifik.

2) Padang Lamun

Penelitian tentang identifikasi lamun juga sudah pernah dilakukan oleh lembaga internasional (REA, 2002) dimana delapan jenis lamun ditemukan pada 5 (lima) pulau di Kepulauan Banda. Jenis-jenis lamun yang ditemukan adalah: *Cymodocea rotundata*, *Cymodocea serrulata*, *Enhalus acoroides*, *Halophila ovalis*, *Halodule uninervis* (dua variasi), *Syringodium isoetifolium*, *Thalassia hemprichii*, dan *Thalassodendron ciliatum*. Persentase dan tingkatan tutupan lamun di perkirakan dengan menggunakan hasil analisa citra LANDSAT. Dari 84,810 m garis pantai di kepulauan Banda, perkiraan luas padang lamun adalah 3.1 km², yang mana pulau Ai memiliki persentase tutupan tertinggi (50%) dan Pulau Banda Besar memiliki perkiraan luas padang lamun terbesar (1.4 km²). Wilayah lamun pada umumnya terbatas

(*localized*) dengan jarak 150 m dari pantai dan lebar sampai dengan 500 m sepanjang pantai. Untuk peta sebaran lamun biasa dilihat pada lampiran peta ekosistem pesisir.

2. Potensi Ekonomi

a. Wisata

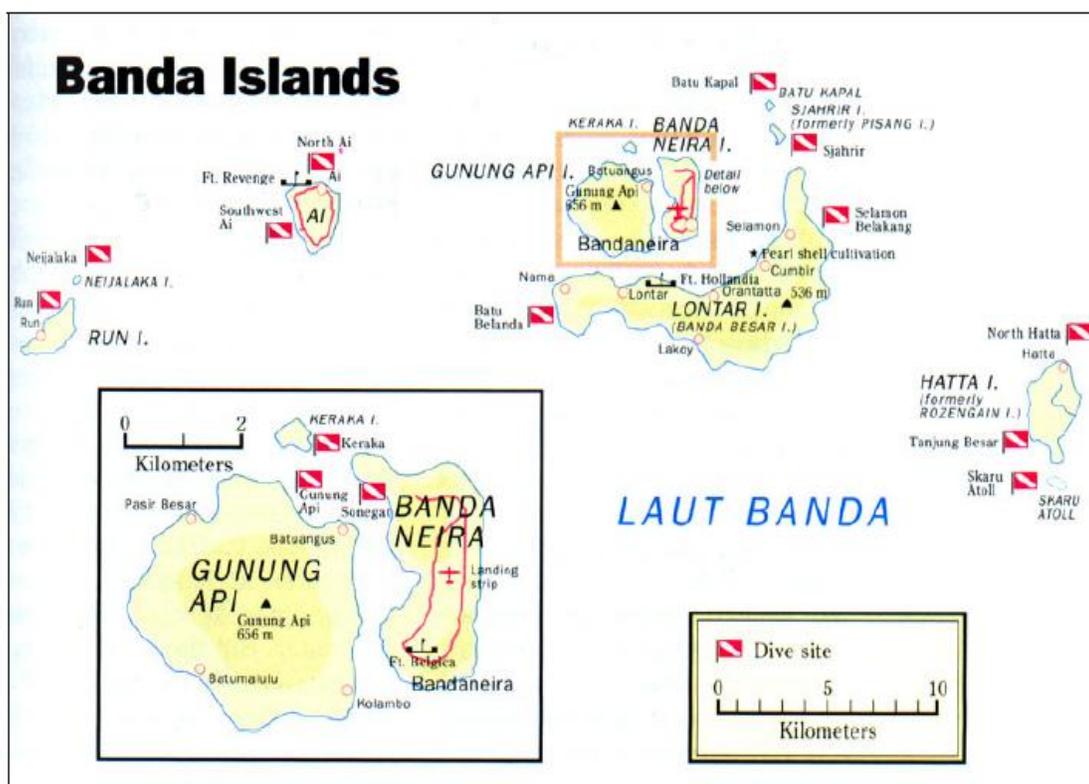
Potensi pariwisata di Kepulauan Banda, Kecamatan Banda, sebagian besar bersifat khusus, yaitu potensi wisata alam, pariwisata bahari, potensi sejarah, budaya dan adat istiadat. Atraksi wisata utama yang dapat dikembangkan di kawasan Kepulauan Banda adalah keanekaragaman sumberdaya alam hayati pesisir dan laut, meliputi habitat terumbu karang, ikan-ikan hias, ikan ekonomis, pemandangan lepas pantai, dan potensi pariwisata lainnya seperti wisata sejarah, budaya, dan adat istiadat dari penduduk yang ada di Kepulauan Banda. Lokasi pariwisata yang terdapat di dalam TWP Laut Banda sebagaimana tersebut pada table 1.

Tabel 1. Lokasi Pariwisata yang Terdapat Di Dalam Kawasan Konservasi Perairan Taman Wisata Perairan Laut Banda.

NAMA PULAU	NAMA OBJEK WISATA	JENIS WISATA
P. Gunung Api	<ul style="list-style-type: none"> - Aliran lahar - Gunung Api 	<ul style="list-style-type: none"> - alam - Minat Khusus
P. Banda Besar	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah perkenir - Kubur 1 jengkal - Masjid tua kota marak - Mata air cilu bintang - Benteng holandia - Sumur tua - Cuci perigi pusaka - Kota marak - Taman laut wali - Tanjung burang - Pantai lonthoir 	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah - Sejarah - Sejarah - Alam - Sejarah - Sejarah - Budaya - Sejarah - Bahari - Bahari - Bahari
P. Pisang/ Syahrir	<ul style="list-style-type: none"> - Taman Laut Pulau Sjahrir - Tanjung Seram 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahari - Alam
P. Neira	<ul style="list-style-type: none"> - Istana Mini - Lomba Kora-kora - Tari Cakalele - Rumah Bung Hatta - Patung Wiliem III - Rumah Residen Belanda - Rumah Pengasingan Dr. Cipto Mangunkusumo - Monumen Perigi Rantai 	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah - Budaya - Budaya - Sejarah - Sejarah - Sejarah - Sejarah - Sejarah - Sejarah

NAMA PULAU	NAMA OBJEK WISATA	JENIS WISATA
	<ul style="list-style-type: none"> - Gereja Tua Banda - Rumah Budaya - Rumah Sjahrir - Benteng Belgica - Benteng Nassau - The House Capitain Colle - Koleksi Ika Sumantri - Gunung Manangis - Batu Berdarah - Pantai Malole - Gunung Papan Berg - Perigi Laci 	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah - Sejarah - Sejarah - Sejarah - Sejarah - Sejarah - Bahari - Minat Khusus - Sejarah

Secara keseluruhan jumlah obyek wisata di Kecamatan Banda merupakan obyek wisata yang paling banyak jumlahnya di Kabupaten Maluku Tengah, dikarenakan Kecamatan Banda merupakan daerah yang bersejarah, keindahan alam yang indah dan budaya atau adat istiadat masyarakat setempat yang masih dijaga. Lokasi-lokasi potensial untuk obyek wisata di Kecamatan Banda yang dapat dikembangkan dan dinikmati di Kepulauan Banda antara lain adalah diving, snorkling, memancing, katamarang, berjemur, berlayar, fotografi bawah air dan lain-lain. Lokasi wisata bahari di Kepulauan Banda sebagaimana tersebut pada gambar 11.



Gambar 11. Peta Lokasi Wisata Penyelaman Di Kepulauan Banda (Sumber: *Periplus Guide: Underwater Indonesia*, 1992).

b. Budidaya Kerang Mutiara

Salah satu wilayah yang menjadi zona pengembangan budidaya kerang mutiara yaitu di wilayah Kepulauan Banda, tepatnya di daerah Spancibi, Selamon di Pulau Banda Besar (survey lapangan, 2011). Pada awalnya perusahaan yang beroperasi yaitu PT. Manae Southern Pearl yang merupakan kolaborasi antara pengusaha swasta nasional dan perusahaan Jepang. Meskipun baru dalam lingkup wilayah skala kecil, tapi potensi budidaya kerang mutiara patut diperhitungkan sebagai salah satu potensi yang dimiliki oleh kawasan TWP Laut Banda. Selanjutnya pengelolaan budidaya kerang mutiara tersebut diambil alih oleh PT. Banda Marine yang merupakan kolaborasi dengan perusahaan Cina. Untuk kegiatan budidaya mutiara ini menggunakan tenaga kerja lokal dalam pengoperasiannya.

3. Potensi Sosial Budaya

a. Kependudukan

Modal utama pembangunan adalah penduduk. Jumlah penduduk kecamatan Banda pada tahun 2010 berjumlah 18.544 jiwa, mengalami penurunan sebesar 2,68 persen dari tahun 2009 yang jumlah penduduknya 19.054 jiwa. Pertambahan penduduk yang mengungsi ke wilayah kecamatan ini mencapai sebanyak 4.494 orang terdiri dari 2.385 orang laki-laki dan 2.109 orang perempuan. Penyebaran jumlah pengungsi yang paling banyak terdapat di Desa Kampung Baru sebanyak 894 orang, kemudian Desa Nusantara 853 orang, dan Desa Lonthoir sebanyak 672 orang (BPS kecamatan Banda, 2002).

Dengan jumlah tersebut diharapkan mampu menunjang kelancaran program pembangunan di kecamatan Banda. Berdasarkan data BPS kecamatan Banda tahun 2011 diketahui bahwa persentase jumlah penduduk yang bekerja dengan total jumlah penduduk di kecamatan Banda adalah 28,70% dengan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Untuk gambaran selengkapnya mata pencaharian penduduk di wilayah kecamatan Banda sebagaimana tersebut pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Banda

No	Desa	Swasta	Honoror	Pedagang	Buruh	Nelayan	Petani	Akomodasi	Jasa Transportasi		Lain2	Total
									Darat	Laut		
1	Kampung baru	6	49	131	52	307	28	4	77	5	19	678
2	Nusantara	4	20	281	27	73	50	9	47	5	170	686
3	Dwiwarna	2	20	63	24	9	3	2	37	1	27	188
4	Merdeka	2	17	43	47	44	19	4	18	1	15	210
5	Rajawali	-	14	23	60	26	31	4	19		20	197
6	Tanah rata	-	10	54	24	48	74	6	15	9	27	267
P. Naira		14	130	595	234	507	205	29	213	21	278	2226
7	Lonthoir	12	18	115	40	140	784	5	30	66	32	1242
8	Selamon	-	8	34	4	87	478	3	7	6	1	628
9	Waer	-	21	29	13	54	396		47	5	5	570
P. Banda Besar		12	47	178	57	281	1658	8	84	77	38	2440
10	P. Hatta	-	6	40	8	28	88	1		3		174
11	P. Ai	-	12	47	8	38	282	8		5	5	405
12	P. Rhun	-	20	41	22	159	111			5	3	361
Total Kecamatan Banda		26	215	901	329	1013	2344	46	297	111	324	5606

Konsentrasi penduduk tertinggi di kecamatan Banda terdapat di desa Dwiwarna dengan kepadatan penduduk 637 jiwa per Km². Kepadatan penduduk terendah terdapat pada desa Pulau Hatta yaitu sebesar 29 jiwa per Km². Secara keseluruhan kepadatan penduduk Banda adalah 108 jiwa per Km². Jumlah dan sebaran penduduk sebagaimana tersebut pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah dan Sebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Pulau Rhun	660	588	1.248
Pulau Ay	685	642	1.327
Lonthoir	2.113	2.134	4.247
Pulau Hatta	234	233	467
Selamon	1.081	1.103	2.184
Kampung Baru	1.423	1.501	2.924
Dwiwarna	438	454	892
Rajawali	320	337	657
Merdeka	356	387	743
Nusantara	930	970	1.900
Waer	592	573	1.165
Tanah Rata	388	402	790
Total Kecamatan Banda	9.220	9.324	18.544

Sumber : *Banda Dalam Angka (BPS, 2012)*

Untuk tahun 2012 jumlah penduduk di kecamatan Banda mencapai total 18.544 orang dengan perisian 9.220 orang adalah laki-laki dan 9.324 orang perempuan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio perbandingan antara laki-laki dan

perempuan adalah hampir berbanding 1:1. Secara rinci data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 5.

b. Kearifan Lokal

Kearifan lokal dapat dikembangkan sekaligus dapat dijadikan ujung tombak dalam pengelolaan misalnya system *sasi*. Sasi merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat di kepulauan Banda di dalam mengelola sumberdaya pesisir dan lautnya. Namun sayangnya dari 11 pulau di Kepulauan Banda, hanya pulau Hatta saja yang masih menjalankan tradisi sasi lola. Beberapa pulau seperti Banda Besar, Ay dan Rhun juga sebelumnya menjalankan tradisi sasi, namun saat ini sasi tidak dijalankan kembali oleh masyarakat karena semakin menurunnya sumberdaya pesisir dan laut khususnya lola. Untuk itu diperlukan revitalisasi kearifan lokal terkait Sasi dan mempertegas serta memperkuat wilayah kelola masyarakat di kepulauan Banda. Di wilayah tertentu budaya-budaya seperti pengambilan karang untuk dijadikan pondasi, mengkonsumsi daging dan telur penyusut dipertahankan sehingga diperlukan strategi untuk meminimalisir dampak budaya lokal yang bias mengancam kelestarian biota laut tertentu.

B. Permasalahan Pengelolaan

Beberapa permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pengelolaan TWP Laut Banda diidentifikasi dari hasil-hasil pertemuan dengan stakeholder dilapangan maupun dari hasil-hasil kajian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Permasalahan tersebut meliputi:

1. Terjadinya degradasi ekosistem dan lingkungan

Kerusakan terumbu karang pada Wilayah pesisir dan laut di TWP Laut Banda akibat dari berbagai aktivitas manusia dan aktivitas alam. Faktor penyebab terjadinya kerusakan terumbu karang oleh aktivitas alam yaitu kenaikan suhu perairan yang terkait dengan pemanasan global dan letusan gunung berapi sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan habitat di sekitar perairan TWP Laut Banda. Sedangkan faktor aktivitas manusia yaitu:

- a. penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan potasium dan bom yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Banda dan nelayan pendatang sehingga terjadi kerusakan ekosistem terumbu karang yang merupakan habitat bagi biota Laut;

- b. pengambilan karang dan penambangan pasir yang kerap dijadikan sebagai bahan bangunan juga menjadi persoalan yang perlu menjadi perhatian sehingga tidak terjadi abrasi pantai dan tidak menyebabkan kerusakan ekosistem pantai di Kepulauan Banda;
- c. pembuangan jangkar yang tidak terarah dan tertata yang dilakukan oleh kapal wisata, kapal pengumpul ikan dan nelayan setempat;
- d. aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan yang merusak, misalnya penggunaan jaring hela oleh disekitar ekosistem terumbu karang;
- e. aktivitas masyarakat yang masih melakukan pembuangan Sampah ke laut diakibatkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, belum adanya pengelolaan sampah secara baik dikarenakan belum tersedianya tempat-tempat sampah dilingkungan sekitar masyarakat, transportasi (alat pengangkut sampah) dari lingkungan masyarakat ke tempat pembuangan akhir dan belum adanya pengolahan sampah anorganik dan organik.

2. Kurangnya Kesadar-tahuan Para Pemangku Kepentingan

Di kepulauan Banda masyarakat, pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai pentingnya ekosistem pesisir dan laut untuk di lestariakan. Untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan pengetahuan para pemangku kepentingan melalui berbagai media dan strategi. Agar tidak Terjadinya konflik diantara pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan di TWP Laut Banda. Sehingga diperlukan leading sektor yang dapat mengayomi semua kepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan di TWP Laut Banda. Perlu adanya pembentukan forum kolaboratif dengan melibatkan para pemangku kepentingan dibawah koordinasi SATKER TWP Laut Banda penting untuk dilakukan guna bersama-sama mendorong pengelolaan TWP Laut Banda yang efektif.

3. Pemiskinan nelayan tradisional

Penggunaan berbagai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan penggunaan alat tangkap dengan teknologi yang lebih memadai menyebabkan pemiskinan nelayan tradisional, sehingga diperlukan pelarangan dan peraturan untuk memberikan peluang pada nelayan tradisional dalam meningkatkan taraf hidupnya. dikarenakan pernah terjadi konflik antara nelayan tradisional dan nelayan jaring lingk

yang melakukan penangkapan disekitar perairan Taman Wisata Perairan Laut Banda. Disamping itu diperlukan pendampingan, bimbingan dan pemberian modal usaha alternatif bagi nelayan tradisonal secara kontinyu dan terencana.

4. Aturan dan Lemahnya penegakan hukum

Penegakan hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaan TWP Laut Banda yang sesuai dengan aturan yang ada menjadi penting untuk dapat menimbulkan efek jera, sehingga sumberdaya dapat dimanfaatkan dan dikelola secara bijak namun jika penegakan hukum lemah dapat memperparah kerusakan sumberdaya. Berbagai aktivitas yang terkait dengan pelanggaran hukum dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pengelolan di TWP Laut Banda antara lain pemboman, pembiusan, perusakan lingkungan, *illegal fishing*, penangkapan biota yang dilindungi dan lainnya, hal ini jika tidak dilakukan penindakan sesuai aturan hukum yang ada justru dapat mempercepat kerusakan ekosistem dan kritisnya biota tersebut. Oleh karena itu, Keberadaan TWP laut banda juga perlu dimasukkan kedalam kebijakan rencana tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir kabupaten Maluku Tengah, agar dapat berjalan dengan sejalan antara kegiatan konservasi di TWP Laut Banda dan pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah

5. Penangkapan yang berlebih (*Overfishing*)

Penangkapan biota laut yang berlebih akibat dari *open aces* dan kurangnya pengaturan tentang ukuran yang boleh ditangkap, jenis yang tidak boleh ditangkap, jenis alat tangkap yang dilarang dan dapat digunakan, serta nilai ekonomi sumberdaya tersebut menyebabkan terjadinya *overfishing* sehingga sumberdaya tersebut terancam punah.

BAB III PENATAAN ZONASI

A. Umum

Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran, maka perlu dilakukan identifikasi program prioritas. Penentuan hasil analisis prioritas program dilakukan dengan memperhatikan variabel dan parameter yang dianggap penting sebagai faktor penentu keberhasilan pengelolaan. Adapun penentuan bobot dan skor penilaian terhadap variabel penting dikaitkan dengan keberlanjutan program, cakupan program, dampak penting, dan faktor-faktor eksternalitas. Untuk melakukan analisis program dan kegiatan strategis, maka digunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) untuk mengetahui peluang dan kendala serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan.

Strategi dan kebijakan TWP Laut Banda diarahkan pada 1) pembangunan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, harus memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*); 2) penerimaan devisa negara melalui pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya wisata bahari; 3) mendorong ekonomi lokal untuk tumbuh dan menciptakan lapangan kerja dengan mendaya gunakan sumber daya yang tersedia secara baik; 4) perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan; dan 5) menjaga kelestarian sumber daya.

Penyusunan strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan TWP Laut Banda dilakukan dengan menggunakan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau analisis SWOT, yaitu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam memformulasikan pengelolaan kawasan TWP Laut Banda secara berkelanjutan.

Analisis SWOT merupakan suatu analisis yang memperhatikan tentang hubungan atau interaksi unsur-unsur internal (antara kekuatan dan kelemahan) terhadap unsur-unsur eksternal (peluang dan ancaman). Strategi pengelolaan kawasan TWP Laut Banda seyogyanya didasari atau mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek teknis-ekologis, aspek sosial-ekonomi-budaya, aspek sosial politik, dan aspek hukum dan kelembagaan. Oleh karena itu, rencana pengelolaan TWP Laut Banda

didasarkan atas faktor-faktor eksternal dan internal yang dilakukan dengan mempertimbangkan keempat aspek tersebut di atas.

Rencana pengelolaan kawasan TWP Laut Banda disusun melalui penelaahan potensi, karakteristik dan kenyataan di lapangan dalam menggali unsur-unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Selain itu, perlu juga menganalisis lebih mendalam mengenai unsur SWOT tersebut yang mungkin atau diperkirakan berpotensi akan muncul ke depan. Dengan demikian, pengelolaan kawasan TWP Laut Banda yang diformulasikan dapat bersifat antisipatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Identifikasi unsur-unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam merumuskan pengelolaan kawasan TWP Laut Banda sebagaimana tersebut pada Tabel 6.

Tabel 6. Identifikasi Unsur-Unsur Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman (SWOT) dalam Pengelolaan TWP Laut Banda

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya dukungan pemerintah yang tinggi (UPT/BKKPN Kupang) dalam pengelolaan KKP Laut Banda b. Potensi wisata bahari yang sangat baik c. Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan TWP Laut Banda cukup tinggi d. Mempunyai biodiversitas yang tinggi e. Memiliki budaya secara yang sangat bagus. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya koordinasi dan implementasi dalam Pengelolaan TWP Laut Banda (karena terkait dengan banyak sektor) b. TWP Laut Banda yang ada belum dikelola secara efektif c. Kurang mendapat dukungan politik dan peraturan perundang-undangan (Petunjuk operasional dan teknis) d. Kualitas dan Kuantitas SDM yang mengelola TWP Laut Banda masih rendah e. Dana operasional yang tidak memadai f. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
<ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah b. Tingginya dukungan dari para pihak (Pemerintah Pusat, Kabupaten, Kecamatan, LSM, dan Swasta). c. Dukungan masyarakat terhadap konservasi. d. Potensi wisata bahari dan budaya yang cukup tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Gangguan keamanan di kawasan oleh kapal nelayan dari luar kawasan yang menangkap ikan secara ilegal (<i>Illegal fishing</i>), menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan dan penangkapan ikan berlebihan (<i>overfishing</i>). b. Perubahan Iklim : Kenaikan muka air laut dan kenaikan suhu permukaan laut (menyebabkan bleaching dan penyakit). c. Kerusakan habitat akibat penggunaan alat yang tidak ramah lingkungan, penambangan karang. d. Banyaknya polusi dari daratan berupa plastik, limbah kimia, dan pencemaran di laut berupa limbah minyak dan suara dari kapal

	<p>pengumpul ikan.</p> <p>e. Penangkapan spesies-spesies yang dilindungi mempunyai nilai ekonomis yang tinggi seperti Napoleon dan Penyu.</p> <p>f. Dampak Pembangunan terhadap keutuhan ekosistem berupa sedimentasi, konversi lahan, meningkatnya intensitas pelayaran</p> <p>g. Meningkatnya jumlah penduduk yang berakibat pada tingginya tekanan terhadap sumberdaya.</p>
--	--

Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal dan faktor-faktor peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal. Faktor-faktor kekuatan dan peluang memberikan dampak positif, sedangkan faktor-faktor kelemahan dan ancaman memberikan dampak negatif dalam pengelolaan kawasan TWP Laut Banda secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam Penyusunan strategi pengelolaan kawasan TWP Laut Banda disusun berdasarkan atas kondisi faktual di lapangan, komponen SWOT yang disajikan pada Tabel 6 di atas, maka teknik yang digunakan adalah strategi silang dari faktor SWOT, yaitu :

- Strategi S-O, yaitu strategi yang disusun untuk memanfaatkan seluruh kekuatan dan mengoptimalkan peluang yang ada.
- Strategi S-T, yaitu strategi yang disusun untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dalam menanggulangi ancaman yang ada.
- Strategi W-O, yaitu strategi memanfaatkan peluang secara optimal untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki.
- Strategi W-T, yaitu strategi yang disusun untuk mengatasi kelemahan dan mengeliminasi ancaman yang mungkin terjadi.

Berdasarkan pendekatan di atas, maka untuk merumuskan strategi dan program pengelolaan kawasan TWP Laut Banda, sebagaimana tersebut pada Tabel 7.

Tabel 7. Formulasi Strategi Pengelolaan Kawasan TWP Laut Banda

Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah 2. Tingginya dukungan dari para pihak (Pemerintah Pusat, Kabupaten, Kecamatan, LSM, dan Swasta). 3. Dukungan masyarakat terhadap konservasi. 4. Potensi wisata bahari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gangguan keamanan di kawasan oleh kapal nelayan dari luar kawasan yang menangkap ikan secara ilegal (<i>Illegal fishing</i>), menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan dan penangkapan ikan berlebihan (<i>overfishing</i>). 2. Perubahan Iklim : Kenaikan muka air laut dan kenaikan suhu permukaan laut (menyebabkan bleaching dan penyakit).

<p>dan budaya yang cukup tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kerusakan habitat akibat penggunaan alat yang tidak ramah lingkungan, penambangan karang. 4. Banyaknya polusi dari daratan berupa plastik, limbah kimia, dan pencemaran di laut berupa limbah minyak dan suara dari kapal pengumpul ikan. 5. Penangkapan spesies-spesies yang dilindungi mempunyai nilai ekonomis yang tinggi seperti Napoleon dan Penyu. 6. Dampak Pembangunan terhadap keutuhan ekosistem berupa sedimentasi, konversi lahan, meningkatnya intensitas pelayaran 7. Meningkatnya jumlah penduduk yang berakibat pada tingginya tekanan terhadap sumberdaya.
-------------------------------------	---

Berdasarkan Tabel 7 di atas terdapat sebelas strategi pengelolaan kawasan TWP Laut Banda yang disusun berdasarkan unsur-unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yaitu:

1. Koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka perlindungan dan pengawasan TWP Laut Banda;
2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan pariwisata;
3. Koordinasi dengan Permerintah Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. *Capacity building* (peningkatan kemampuan) secara kontinyu bagi tenaga yang ada melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga mempunyai kemampuan dan keterampilan yang memadai;
5. Membuka peluang kerjasama dengan berbagai organisasi/lembaga terkait lainnya baik di lingkup nasional maupun internasional serta meningkatkan apresiasi para pihak untuk lebih peduli pada TWP Laut Banda;
6. Pengembangan dan penambahan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh TWP Laut Banda, serta perawatan perlengkapan dan fasilitas secara berkala untuk menghindari kerusakan dan biaya perbaikan yang mahal;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan dan pengamanan kawasan dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas;
8. Mengoptimalkan sarana dan prasarana;
9. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan kawasan dan penegakan hukum;

10. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia pengelola kawasan konservasi perairan, baik pengetahuan mengenai konservasi kawasan maupun konservasi spesies dan genetik;
11. Pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan (MPA *networking*) dalam skala kawasan, regional dan nasional.

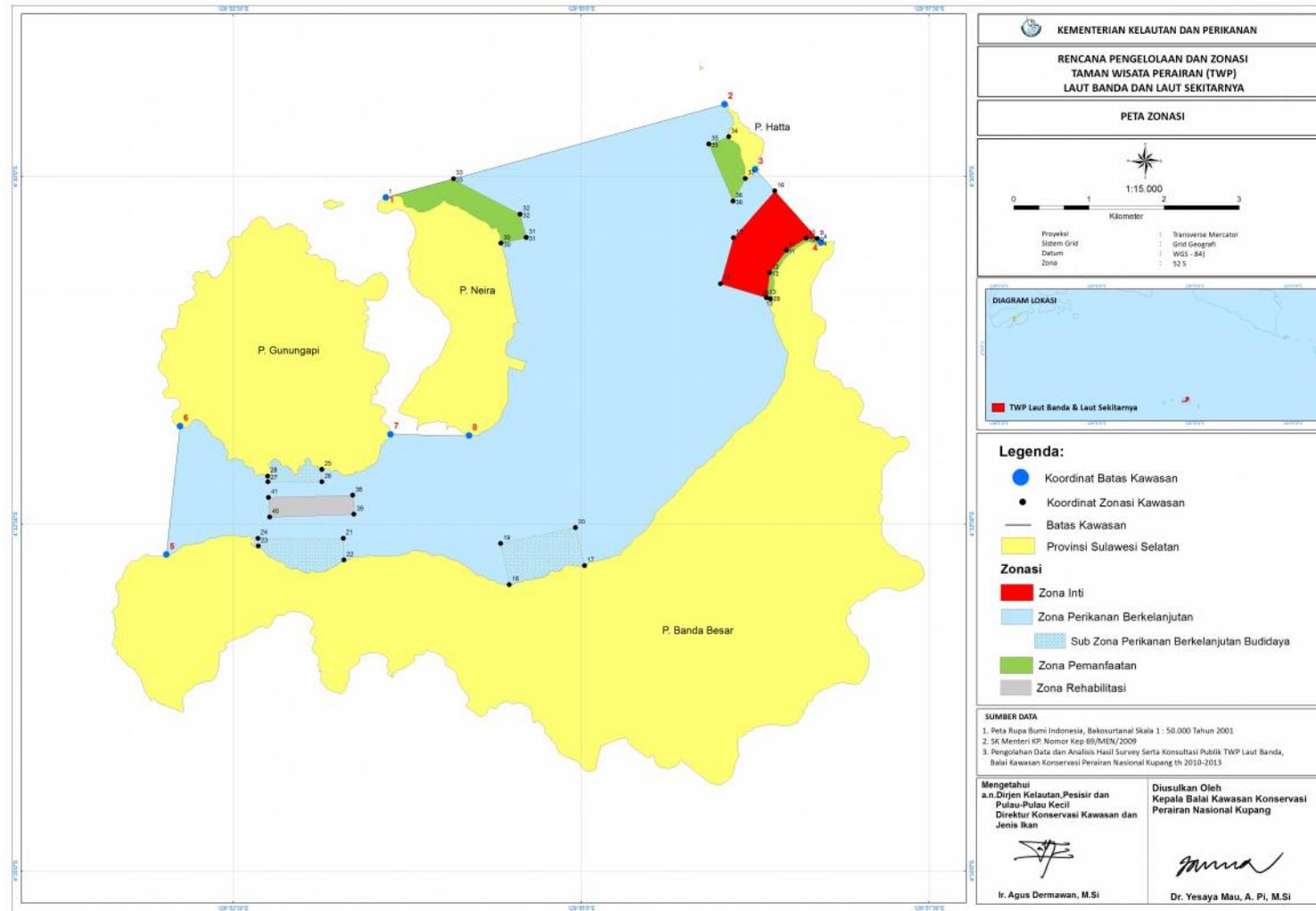
Analisis kesesuaian zona dilakukan dengan menggunakan matriks kesesuaian, disamping itu juga dilakukan sistem pembobotan dari aspek ekologi, manfaat, sosial dan ekonomi. Penentuan kriteria sebagaimana tersebut pada tabel 8 sebagai berikut;

Tabel 8. Kriteria Penentuan Zonasi Kawasan Konservasi TWP Laut Banda

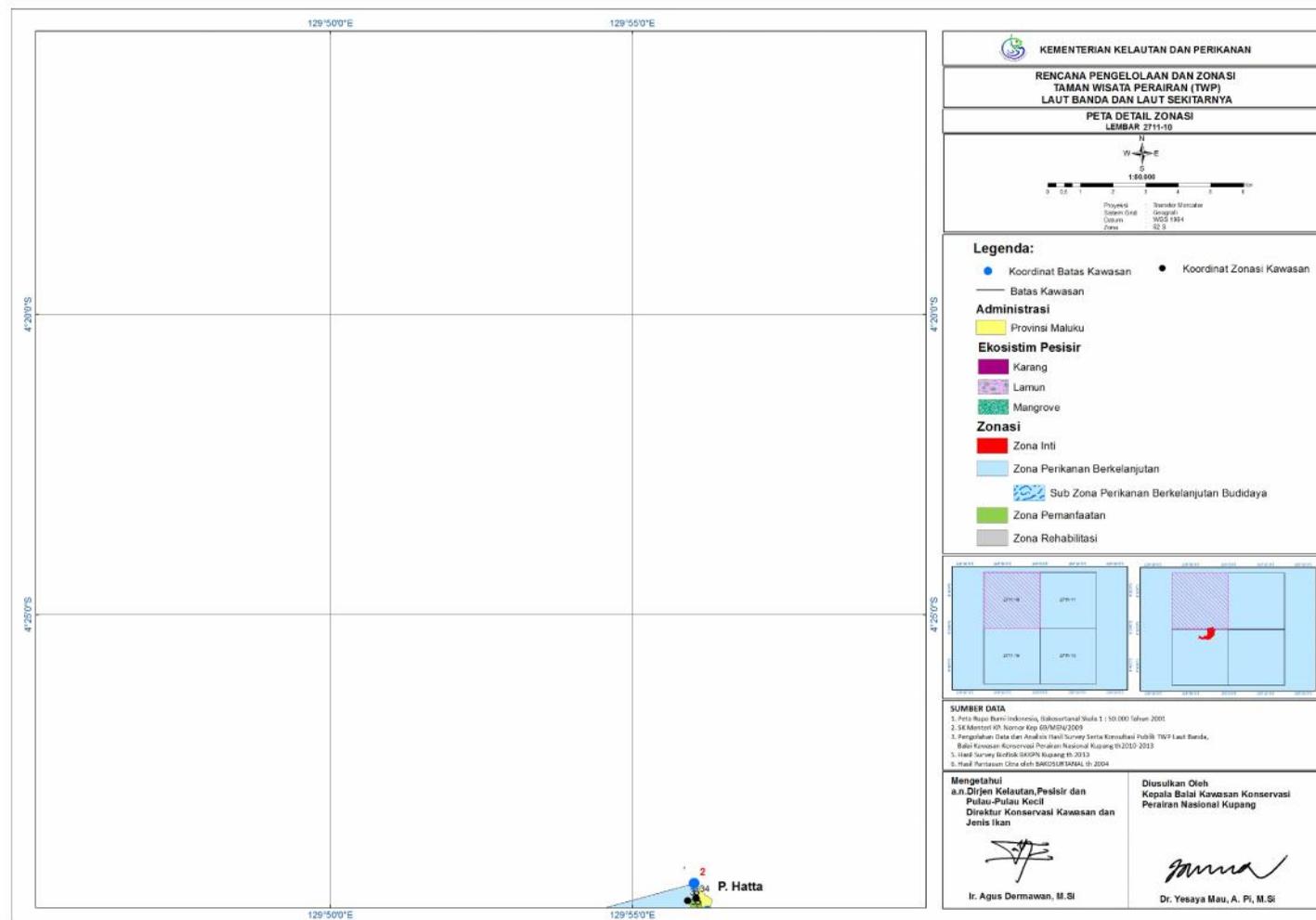
Kriteria	Zona Inti	Zona Perikanan Berkelanjutan	Zona Pemanfaatan	Zona Lainnya
	1	2	3	4
EKOLOGI				
- Keanekaragaman Ekosistem	√		√	
- Keanekaragaman Jenis Fauna	√	√	√	
- Keanekaragaman Jenis Flora	√	√	√	
- Keterwakilan	√	√	√	
- Keaslian	√			
- Keunikan	√		√	
- Ketergantungan	√	√		
- Produktivitas	√	√	√	√
- Daerah migrasi spesies langka	√			
MANFAAT				
- Luas Wilayah		√	√	√
- Kepentingan perikanan tangkap		√		
- Kepentingan perikanan budidaya				
- Pemulihan Kondisi Alam	√	√	√	
SOSIAL				
- Sarana Rekreasi			√	
- Penelitian dan Pendidikan	√	√	√	
- Keamanan			√	√
- Kemudahan Mencapai Lokasi			√	
- Estetika			√	
- Dukungan Masyarakat	√	√	√	
- Kearifan Lokal	√		√	
EKONOMI				
- Pariwisata			√	
- Kepentingan Bagi Nelayan				√

Zonasi di TWP Laut Banda mengacu pada pembagian zonasi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010. Penetapan zonasi didasarkan pada berbagai hasil studi dan analisis yang mendalam, *ground-truthing* dan konsultasi publik dengan *stakeholder* terkait di tingkat kabupaten, desa dan dusun di kawasan TWP Laut Banda.

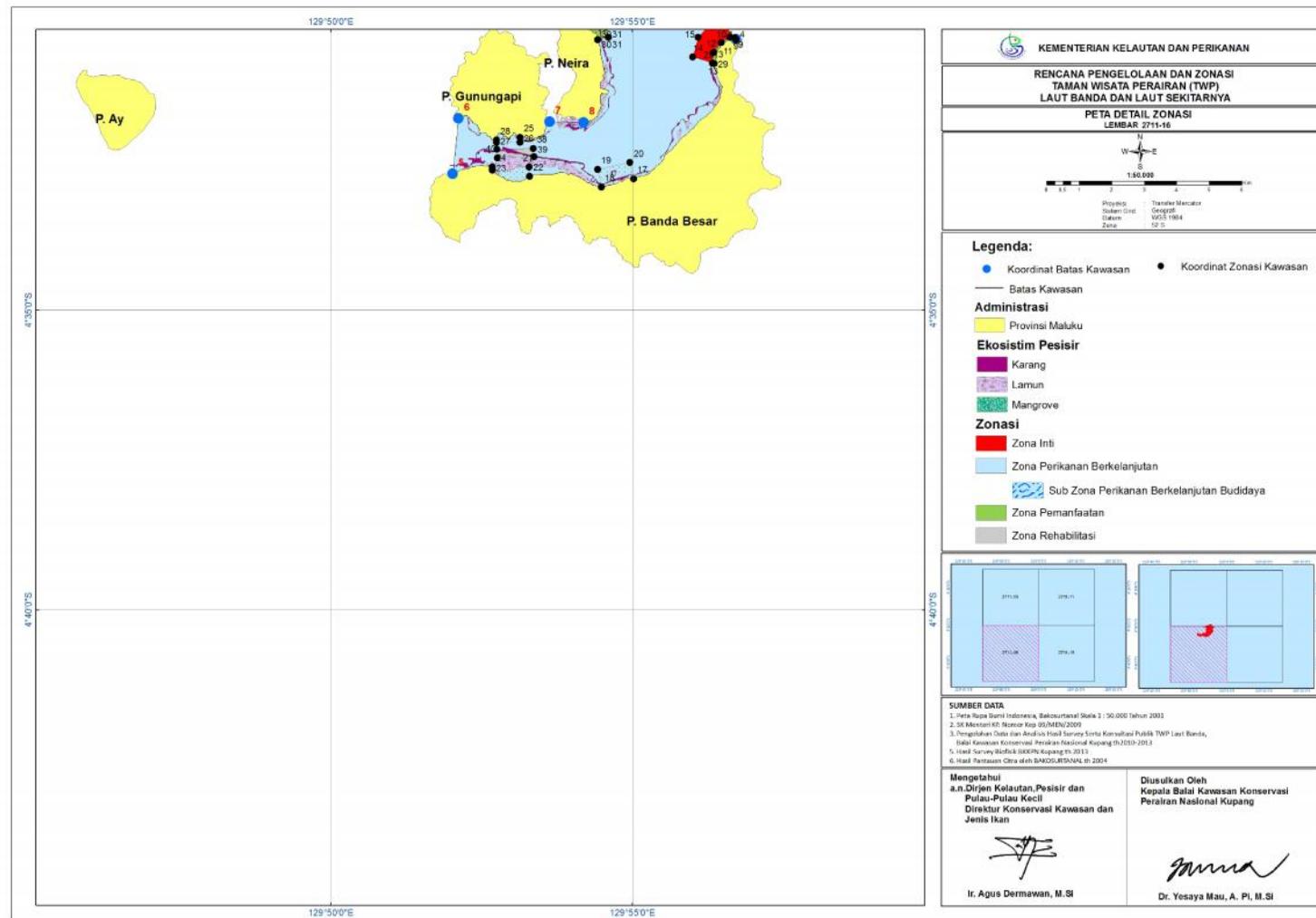
Luas Kawasan Konservasi Perairan Nasional TWP Laut Banda adalah 2.500 ha, penetapan zonasi TWP Laut Banda sebagaimana ditunjukkan dalam peta zonasi kawasan pada Gambar 12. (Peta Zonasi TWP Laut Banda dengan skala 1 : 15.000) dengan titik koordinat batas kawasan yang dapat dilihat pada Tabel 9, serta peta detail zonasi pada Gambar 13a. dan Gambar 13b. (Peta Detail Zonasi TWP Laut Banda dengan skala 1 : 50.000) dalam berikut.



Gambar 12. Peta Zonasi TWP Laut Banda



Gambar 13.1. Peta Detail Zonasi TWP Laut Banda



Gambar 13.2. Peta Detail Zonasi TWP Laut Banda

Tabel 9. Koordinat kawasan konservasi perairan TWP Laut Banda.

Nomor Titik Koordinat	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
	X	Y
1	116° 1' 38,13" BT	8° 21' 34,19" LS
2	116° 1' 52,10" BT	8° 21' 27,80" LS
3	116° 1' 40,50" BT	8° 20' 49,60" LS
4	116° 1' 28,40" BT	8° 20' 47,82" LS
5	116° 1' 25,06" BT	8° 21' 17,06" LS
6	116° 1' 41,41" BT	8° 21' 38,49" LS
7	116° 1' 54,60" BT	8° 21' 32,10" LS
8	116° 2' 26,10" BT	8° 21' 36,10" LS
9	116° 2' 40,74" BT	8° 21' 40,69" LS
10	116° 2' 26,61" BT	8° 21' 59,25" LS

Sistem zonasi dalam kawasan konservasi perairan nasional TWP Laut Banda dibagi menjadi 4 (empat) zona yaitu zona inti, zona perikanan berkelanjutan dengan satu sub zona yaitu sub zona perikanan berkelanjutan budidaya, zona pemanfaatan dan zona lainnya yaitu zona rehabilitasi yang memiliki potensi, peruntukan/tujuan zona dan kegiatan yang boleh dan tidak boleh untuk masing-masing zona sebagaimana dijelaskan secara detail di sub bab di bawah ini.

B. Zona Inti

1. Rancangan Zonasi dan Koordinat

Zona inti merupakan bagian-bagian kawasan konservasi perairan yang memiliki kondisi alam baik biota ataupun fisiknya masih asli dan/ belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Zona inti mempunyai luas minimal 2 % dari luas kawasan, dengan kriteria antara lain:

- a. merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan;
- b. merupakan habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik, langka dan/atau kharismatik;
- c. mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;

- d. mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu yang masih asli;
- e. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
- f. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis ikan tertentu untuk menunjang pengelolaan perikanan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses bio-ekologis secara alami; dan
- g. mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi kawasan konservasi perairan.

Zona inti kawasan konservasi perairan TWP Laut Banda sudah memenuhi kriteria zona inti untuk kawasan konservasi perairan yaitu seluas 84,3 ha (3,3 % dari total luas kawasan), yang dapat dilihat pada Gambar 13.2. dengan titik koordinat lokasi zona inti dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah in.

Tabel 9. Titik koordinat zona inti

Nomor Titik Koordinat	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)	Luas (Ha)
	X	Y	
9	129.945	-4.50745	84.3
10	129.9436	-4.5074	
11	129.9413	-4.50886	
12	129.9392	-4.51158	
13	129.9389	-4.51456	
14	129.9334	-4.51289	
15	129.9349	-4.50735	
16	129.9399	-4.50175	

2. Potensi

Secara umum kondisi potensi ekologi di zona inti TWP Laut Banda dapat ditunjukkan pada Gambar 13.2. Zona Inti memiliki peran yang cukup besar bagi kawasan TWP Laut Banda, hal ini dikarenakan pada zona inti merupakan daerah ikan memijah seperti ikan kerapu dan kakap, keanekaragaman yang tinggi, ada beberapa jenis ikan yang dilindungi seperti ikan napoleon dan ikan madrin yang endemik. Di zona ini juga masih memiliki kualitas air yang baik untuk pertumbuhan Terumbu Karang.

Karakteristik perairan di wilayah ini memiliki tingkat kecerahan baik, serta TDS dan nutrient yang terendah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Nutrien nitrogen, yang menandakan cemaran dari limpasan aktivitas domestic, di wilayah ini adalah yang terendah jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan kualitas perairannya, penunjukan zona inti di

wilayah selat antara Pulau Pisang dan Pulau Banda Besar ini adalah yang terbaik jika dibandingkan dengan di wilayah lainnya di kawasan konservasi TWP Laut Banda.

Lokasi ini juga merupakan daerah semi terlindung, dengan pesisir pantai pasir putih dan sebagian berbatu vulkanik. Daerah rata-rata terumbu yang landai dan sedikit lebar ± 100 meter ke arah laut, dengan lereng terumbu yang tidak terlalu terjal dengan kemiringan 45° . Dari hasil pengamatan secara visual pada daerah rata-rata terumbu sampai pada daerah lereng terumbu didominasi oleh pertumbuhan *Soft Coral* (SC) yaitu dari marga *Sinularia*, *Lobophytum* dan *Sarcophyton*. Pada lokasi ini terlihat adanya kerusakan karang dengan dijumpai pecahan karang mati berupa *boulder* dan patahan-patahan karang mati yang merupakan akibat dari aktivitas manusia. Berdasarkan hasil transek, pada kedalaman 3 meter persentase tutupan karang keras 40,32%, yang terdiri dari kelompok karang batu *Acropora* 3,0% dan kelompok *Non-Acropora* 37,32%. Karang batu dari kelompok *Non-Acropora* dengan persentase kehadiran tertinggi adalah Coral Encrusting (CE) dengan nilai 28,3%, dari jenis *Montipora* spp. terdapat 397 jenis karang di Kepulauan Banda. Dengan hasil ini maka keanekaragaman jenis karang di Kepulauan Banda dikatakan cukup tinggi.

Sedangkan pada kedalaman 10 meter, persentase tutupan untuk karang keras yaitu 33,7%, yang terbagi dari kelompok karang batu *Acropora* 5,67%, dan kelompok *Non-Acropora* 28,03%. Karang batu dari kelompok *Non-Acropora* dengan persentase kehadiran tertinggi adalah Coral Massive (CM) dengan nilai 12,3%, dari jenis karang batu *Diploastrea heliopora* dan Coral Encrusting (CE) 10,7%, dari jenis *Montipora* spp. Komponen yang cukup menonjol juga adalah pasir (Sand) dengan persentase tutupan 20,0%. Dari hasil yang diperoleh ini menunjukkan jelas bahwa pada lokasi ini pertumbuhan karang batu baik di kedalaman 3 meter maupun 10 meter.

Potensi ikan baik biomassa maupun keanekaragamannya di seluruh banda termasuk dalam kategori yang tinggi. Berdasarkan hasil survey MRA tahun 2012 yang dilakukan CTC dan mitra di 20 titik pengamatan di seluruh pulau yang ada di Banda menunjukkan bahwa rata-rata tingkat keanekaragamannya mencapai 191 jenis. Kelimpahan ikan pada zona ini termasuk yang tinggi (lebih dari 1000 ekor per hektar). Jumlah jenis ikan

yang dijumpai selama survei ini secara keseluruhan adalah 433 spesies ikan dari 49 family. Komposisi jenis ikan yang dijumpai selama survei ini sebagian besar merupakan jenis ikan yang berasosiasi dengan terumbu karang dan relatif sama dengan jenis-jenis ikan di kawasan Indo-pasifik. 13 kelompok family ikan yang paling banyak dijumpai, dari yang paling banyak adalah ikan betok/giru (*Pomacentridae*), ikan keling (*Labridae*), ikan kerapu (*Serranidae*), ikan kepe-kepe (*Chaetodontidae*), ikan butana (*Acanthuridae*), ikan kakatua (*Scaridae*), ikan kuwe (*Carangidae*), ikan kakap (*Lutjanidae*), ikan ekor kuning (*Caesionidae*), ikan enjiel/bidadari (*Pomacanthidae*), ikan murjan (*Holocentridae*), ikan pakol (*Balistidae*), dan ikan capungan (*Apogonidae*). Jumlah spesies ikan dari ketigabelas kelompok ikan ini merupakan 73% dari keseluruhan jumlah spesies yang dijumpai selama survei.

Mengingat pentingnya potensi yang dimiliki maka wilayah ini maka perlu untuk dialokasikan untuk zona inti.

3. Peruntukan/Tujuan Zona

Peruntukan dan peraturan-peraturan untuk zona inti adalah sebagai berikut:

- a. Zona Inti TWP adalah kawasan yang tidak boleh ada penangkapan, budidaya, dan pariwisata;
- b. Zona Inti diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan; penelitian; dan pendidikan;
- c. Zona Inti merupakan kegiatan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan meliputi: perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumberdaya ikan dan ekosistemnya; penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; dan pemulihan dan rehabilitasi ekosistem;
- d. Kegiatan penelitian yang diperbolehkan yaitu: penelitian dasar menggunakan metode naturalistik untuk tujuan pengumpulan data dasar kondisi biologis dan ekologis; penelitian terapan menggunakan metode survei untuk tujuan monitoring kondisi biologis dan ekologis dan pengembangan dengan metode eksperimental untuk tujuan rehabilitasi;
- e. Izin penelitian diberikan oleh Pengelola TWP Laut Banda, tergantung pada terpenuhinya semua persyaratan yang ditetapkan, termasuk persetujuan atas rencana kegiatan

penelitian tersebut (tertulis) oleh Kepala Pengelola TWP Laut Banda atau pejabat yang ditunjuk;

- f. Kegiatan pendidikan diperuntukkan bagi kegiatan tanpa melakukan pengambilan material langsung dari alam;
- g. Izin pendidikan diberikan oleh Pengelola TWP Laut Banda, tergantung pada terpenuhinya semua persyaratan yang ditetapkan, termasuk persetujuan atas rencana kegiatan pendidikan tersebut (tertulis) oleh Kepala Pengelola TWP Laut Banda atau pejabat yang ditunjuk;
- h. Dilarang keras untuk mengambil, menggali, mengganggu atau memindahkan setiap sumberdaya alam (hayati maupun non-hayati).

4. Kegiatan yang Boleh dan Tidak Boleh

Kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di zona inti sebagaimana tersebut pada Tabel 10.

Tabel 10. Perumusan kegiatan yang boleh dan tidak boleh pada Zona Inti

Perumusan Kegiatan	No	Jenis Kegiatan
Kegiatan yang diperbolehkan	1	Patroli pengawasan
	2	Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (Pos Jaga)
	3	Alur Kapal untuk perhubungan masyarakat
Kegiatan yang diperbolehkan tetapi dengan izin	1	Monitoring dan Penelitian non ekstraktif
	2	Pendidikan pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati (ekosistem lamun, mangrove, terumbu dan laut dalam); perlindungan sumberdaya masyarakat lokal; pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari; pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan; promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan
Kegiatan yang tidak diperbolehkan	1	Monitoring dan Penelitian ekstraktif
	2	Tambatan perahu
	3	Pembangunan Infrastruktur wisata, home stay, dan sarana penginapan lainnya
	4	Pembangunan Infrastruktur wisata (resor permanen)
	5	Pembangunan Rumah Adat
	6	Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (kantor)
	7	Sarana dan pelayanan untuk melakukan wisata petualangan (kapal layar (cruise), kapal selam, sea walker, penenggelaman kapal (ship wreck)

Perumusan Kegiatan	No	Jenis Kegiatan
	8	Rekreasi pantai
	9	Wisata menyelam
	10	Wisata snorkeling
	11	Wisata Jet Ski
	12	Wisata Kayak/Dayung
	13	Wisata Surfing
	14	Wisata Kite surfing
	15	Wisata Mancing (Catch and Release)
	16	Wisata perahu kaca (glass boat)
	17	Perahu wisata
	18	Wisata Budaya
	19	Wisata tracking
	20	Pembuatan foto, video, film untuk tujuan komersial
	21	Pembuatan foto, video, film untuk tujuan non komersial
	22	Penangkapan Ikan dengan Jaring insang tetap (Set gill nets (anchored))
	23	Penangkapan Ikan dengan Jaring insang hanyut (Drift nets)
	24	Penangkapan Ikan dengan Jaring insang oseanik
	25	Penangkapan Ikan dengan Jaring angkat (Lift Net)
	26	Penangkapan Ikan dengan Jaring serok (scoop net)
	27	Penangkapan Ikan dengan Bagan Tancap (bamboo platform lift net)
	28	Penangkapan Ikan dengan Bagan Perahu/rakit (Boat/raft lift net)
	29	Penangkapan Ikan dengan Bubu
	30	Penangkapan Ikan dengan Pancing ulur
	31	Penangkapan Ikan dengan Pancing tonda
	32	Penangkapan Ikan dengan Pancing layang-layang
	33	Penangkapan Ikan dengan Sero
	34	Penangkapan Ikan dengan Jermal
	35	Penangkapan Ikan dengan Rawai Tuna
	36	Penangkapan Ikan dengan Rawai Hanyut
	37	Penangkapan Ikan dengan Rawai Tetap
	38	Penangkapan Ikan dengan Rawai Hiu/Cucut
	39	Penangkapan Ikan dengan Huhate
	40	Bameti (dengan alat dan cara yang tidak merusak terumbu karang)
	41	Pemasangan Rumpon
	42	Rumpon telur ikan terbang
	43	Menggunakan bahan beracun, kompresor dan bom
	44	Menangkap Ikan Hias
	45	Menangkap ikan dengan senapan dan tombak
	46	Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan artisanal serta kelompok nelayan yang secara ekonomis memiliki struktur dan unit usaha kecil yang tidak

Perumusan Kegiatan	No	Jenis Kegiatan
		diwajibkan memiliki izin usaha penangkapan ikan
	47	Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh usaha menengah keatas
	48	Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal
	49	Lampara dasar
	50	Penangkapan Ikan dengan Kapal 5 - 30 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan
	51	Penangkapan Ikan dengan Kapal < 5 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan
	52	Menangkap, melukai dan membunuh biota yang dilindungi (termasuk penyu, buaya, manta, duyung, hiu, paus, lumba-lumba, dll)
	53	Budidaya Rumput Laut
	54	Budidaya Mutiara
	55	Budidaya dengan Keramba Jaring Apung (KJA)
	56	Budidaya Teripang
	57	Budidaya Lobster
	58	Membangun Tambak
	59	Pelayaran selain di alur kapal untuk perhubungan
	60	Pengambilan Karang hidup atau mati
	61	Pembuangan Limbah dan Sampah

C. Zona Perikanan Berkelanjutan

1. Rancangan Zonasi dan Koordinat

Zonasi Perikanan Berkelanjutan di TWP Laut Banda seluas 2195.12 ha. Dengan satu sub zona yaitu sub zona perikanan berkelanjutan budidaya dengan luas sebesar 109.2 ha. Sub zona perikanan berkelanjutan budidaya tersebut sesuai kondisi saat ini di lapangan diperuntukan bagi kegiatan budidaya mutiara seluas 53,405 ha dan kegiatan budidaya rumput laut berada di dua lokasi dengan luas masing-masing sebesar 40,602 ha dan 15,188 ha.

Lokasi zonasi perikanan berkelanjutan dan sub zona perikanan berkelanjutan budidaya TWP Laut Banda dapat dilihat pada Gambar 13.1. dan Gambar 13.2. dengan titik koordinat dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Titik koordinat zona perikanan berkelanjutan dan sub zona perikanan berkelanjutan budidaya TWP Laut Banda

ZONA	No. Titik Koordinat	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)	Luas (Ha)
		X	Y	

Zona Perikanan Berkelanjutan	2	129,933830	-4,491287	2195.12		
	3	129,937488	-4,499108			
	5	129,866994	-4,545369			
	6	129,868649	-4,529950			
	7	129,893820	-4,530926			
	8	129,903257	-4,531074			
	13	129,938882	-4,514555			
	14	129,933363	-4,512892			
	15	129,934888	-4,507354			
	16	129,939861	-4,501752			
	17	129,917075	-4,546725			
	18	129,908080	-4,549012			
	19	129,907061	-4,544062			
	20	129,915981	-4,542182			
	21	129,888206	-4,543433			
	22	129,888269	-4,546046			
	23	129,878008	-4,544378			
	24	129,877970	-4,543433			
	25	129,885647	-4,535176			
	26	129,885632	-4,536638			
	27	129,879163	-4,536638			
	28	129,879130	-4,535953			
	29	129,939345	-4,514695			
	30	129,907085	-4,508027			
	31	129,910094	-4,507322			
	32	129,909390	-4,504537			
	33	129,901380	-4,500266			
	34	129,934338	-4,495246			
	35	129,931951	-4,496113			
	36	129,934854	-4,502962			
	37	129,936351	-4,500239			
	38	129,889336	-4,538279			
	39	129,889477	-4,540574			
	40	129,879346	-4,540892			
	41	129,879241	-4,538526			
	Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Budidaya				109.2	
	Budidaya Mutiara	17	129,917075		-4,546725	53,405
		18	129,908080		-4,549012	
		19	129,907061		-4,544062	
		20	129,915981		-4,542182	
	Budidaya Rumput Laut 1	21	129,888206		-4,543433	40,602
22		129,888269	-4,546046			
23		129,878008	-4,544378			
24		129,877970	-4,543433			
Budidaya Rumput Laut 2	25	129,885647	-4,535176	15,188		
	26	129,885632	-4,536638			
	27	129,879163	-4,536638			
	28	129,879130	-4,535953			

2. Potensi

Zona perikanan berkelanjutan merupakan daerah tempat masyarakat setempat melakukan penangkapan ikan pelagis kecil,

ikan karang, ikan dasar, dan pelagis besar. Jenis pelagis kecil yang cukup besar potensinya adalah ikan layang, selar, kue, kembung, tongkol kecil dan kawalnya. Jenis pelagis besar yang juga sering ditangkap nelayan tradisional di zona ini adalah tuna gigi anjing dan sirip kuning. Selain itu ikan dasar berupa kakap putih dan kakap merah juga cukup banyak ditemukan di zona ini. Berdasarkan hasil penelitian CTC dan mitra yang dilakukan pada tahun 2012, setidaknya ada enam kelompok family ikan tropis yang paling mencolok dan paling sering dijumpai, yaitu ikan kepe-kepe (*Chaetodontidae*), ikan enjil/bidadari (*Pomacanthidae*), ikan betok/giru (*Pomacentridae*), ikan keling (*Labridae*), ikan kakatua (*Scaridae*), dan ikan butana (*Acanthuridae*). Keenam jenis ikan itu berasosiasi dengan karang.

Fitur dan kondisi landscape zona perikanan berkelanjutan yang didominasi oleh dasar yang berpasir dengan kemiringan bervariasi mulai dari 0 derajat hingga mencapai 90 derajat membuat habitat yang berada dalam zona ini bervariasi yang terdiri dari padang lamun, terumbu karang dan hamparan pasir. Bagian tengah zona ini umumnya landai dengan kemiringan antara 5 derajat sampai 30 derajat. Sementara pada bagian timur yang berbatasan dengan zona inti dan bagian barat yang berbatasan dengan zona pariwisata dengan kontur bawah laut dengan kemiringan mencapai 90 derajat.

Wilayah ini dialokasikan sebagai zona perikanan berkelanjutan karena mempunyai fungsi penting sebagai sumber utama mata pencaharian bagi nelayan pesisir yang tinggal di sekitar TWP Laut Banda. Meskipun dialokasikan sebagai zona perikanan berkelanjutan, selain aktifitas penangkapan terdapat juga kegiatan untuk wisata penyelaman dan snorkeling. Selain kegiatan penangkapan dan wisata dalam zona perikanan berkelanjutan tersebut terdapat sub zona untuk usaha budidaya seperti, budidaya kerang mutiara, budidaya rumput laut, yang diperuntukan bagi usaha komersial dengan tetap melibatkan masyarakat lokal.

3. Peruntukan/Tujuan Zona

Peruntukan/tujuan zona untuk Zona Perikanan Berkelanjutan di TWP Laut Banda adalah diperuntukan bagi kegiatan perikanan artisanal (skala kecil atau tradisional) khusus untuk mengakomodir kepentingan masyarakat setempat atau nelayan-

nelayan lokal dalam kawasan dengan beberapa pengaturan penggunaan alat tangkap yang bersifat tradisional. Sedangkan tujuan sub zona perikanan berkelanjutan budidaya diperuntukan bagi usaha budidaya rumput laut dan budidaya kerang mutiara bagi dunia usaha yang sifatnya komersial dengan tetap melibatkan masyarakat lokal.

4. Kegiatan yang Boleh dan Tidak

Kegiatan yang boleh dan tidak boleh dalam zona perikanan berkelanjutan dapat dijelaskan sesuai alokasi peruntukan/tujuan zona tersebut. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan yang diperbolehkan yaitu : Perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumberdaya ikan dan ekosistemnya; Pengamanan, pencegahan dan/atau pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; Pengelolaan jenis sumberdaya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; Alur migrasi biota perairan; Pemulihan;
- b. Kegiatan Penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan meliputi: alat penangkapan ikan yang sifatnya statis dan atau pasif dan semi aktif; dan cara memperoleh ikan dengan memperhatikan daya dukung habitat dan/atau tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan;
- c. Alat tangkap yang diperbolehkan yaitu: Pancing Tonda (*Troll Line*), Pancing Ulur (*Hand Line*), Pancing Layang-Layang, senapan, panah, tombak, dan Gill Net (sesuai dengan daerah penangkapan);
- d. Kegiatan penangkapan ikan hanya diperbolehkan dengan menggunakan armada berukuran dibawah 1 GT dan dengan alat tangkap yang diperbolehkan;
- e. Kegiatan yang diperbolehkan untuk penangkapan ikan meliputi: penangkapan ikan ramah lingkungan untuk tujuan komersial; dan penangkapan ikan ramah lingkungan bukan untuk tujuan komersial.
- f. Penangkapan ikan ramah lingkungan untuk tujuan komersial meliputi kegiatan penangkapan ikan untuk pemenuhan

kebutuhan ekonomi baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual.

- g. Penangkapan ikan bukan untuk tujuan komersial meliputi kegiatan penangkapan ikan dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya, kesenangan, dan/atau wisata. Kegiatan tersebut tidak didasarkan pada nilai tukar ekonomis dan/atau nilai tambah ekonomis dan mengutamakan tujuan serta pencapaian kegiatan pendidikan, penyuluhan, penelitian dan/atau kegiatan ilmiah lainnya;
- h. Kegiatan penangkapan ikan di zona perikanan berkelanjutan untuk tujuan komersial hanya dapat dilakukan oleh nelayan kecil dan artisanal serta kelompok nelayan yang secara ekonomis memiliki struktur dan unit usaha kecil yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha penangkapan ikan, tetapi akan dilakukan pendataan secara kolaboratif oleh Pengelola TWP Laut Banda dan Dinas teknis terkait. Sedangkan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh usaha menengah keatas tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di dalam kawasan konservasi perairan;
- i. Pemberian ijin penangkapan ikan untuk tujuan komersial didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: Izin penangkapan ikan untuk tujuan komersial hanya diberikan kepada nelayan kecil; Masa berlaku izin penangkapan untuk tujuan komersial diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat ditinjau kembali; Tidak diperkenankan menangkap ikan yang dalam status dilindungi; Menggunakan alat tangkap yang selektif sesuai ciri-ciri selektivitas alat tangkap ikan; Tidak menambah jumlah dan kapasitas unit penangkapan ikan yang telah diizinkan; Tidak menambah jumlah nelayan (orang) dalam kegiatan operasi penangkapan sesuai dengan yang telah diizinkan; dan harus melaporkan perkembangan kegiatan usaha dengan menyampaikan jumlah produksi penangkapan.
- j. Persyaratan untuk permohonan ijin penangkapan untuk tujuan komersial harus menjelaskan metoda penangkapan, jenis dan jumlah unit penangkapan yang digunakan serta jumlah nelayan (orang) yang terlibat dalam operasi penangkapan ikan.
- k. Pemberian ijin penangkapan ikan bukan untuk tujuan komersial didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: Alat

tangkap yang digunakan sangat tinggi selektivitasnya; Tidak diperkenankan menangkap ikan yang dalam status dilindungi; dan tidak menghasilkan hasil tangkapan sampingan.

1. Persyaratan untuk permohonan ijin penangkapan bukan untuk tujuan komersial harus menjelaskan metoda penangkapan, jenis dan unit penangkapan ikan yang digunakan.

Kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di zona perikanan berkelanjutan di TWP Laut Banda dapat lihat lebih rinci pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Perumusan kegiatan yang boleh dan tidak boleh pada Zona Perikanan Berkelanjutan

Perumusan Kegiatan	No	Kegiatan
Kegiatan yang diperbolehkan	1	Patroli pengawasan
	2	Tambatan perahu
	3	Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (kantor)
	4	Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (Pos Jaga, Jetty)
	5	Pembuatan foto, video, film untuk tujuan non komersial
	7	Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan artisanal serta kelompok nelayan yang secara ekonomis memiliki struktur dan unit usaha kecil yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha penangkapan ikan
	8	Penangkapan Ikan dengan Kapal < 1 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan
	9	Budidaya Rumput Laut
	10	Alur Kapal untuk perhubungan
	11	Pelayaran selain di alur kapal untuk perhubungan
	Kegiatan yang diperbolehkan tetapi dengan izin	1
2		Monitoring dan Penelitian ekstraktif
3		Pendidikan pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati (ekosistem lamun, terumbu dan laut dalam); perlindungan sumberdaya masyarakat lokal; pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari; pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan; promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan.
4		Pembangunan Infrastruktur wisata hotel, home stay, dan sarana penginapan lainnya
5		Pembangunan Infrastruktur wisata (resor permanen)
6		Sarana dan pelayanan untuk melakukan wisata petualangan (kapal layar (cruise), sea walker, penenggelaman kapal (ship wreck)

Perumusan Kegiatan	No	Kegiatan
	7	Rekreasi pantai
	8	Wisata menyelam
	9	Wisata snorkeling
	10	Wisata Jet Ski
	11	Wisata Kayak/Dayung
	12	Wisata Surfing
	13	Wisata Kite surfing
	14	Wisata Mancing (Catch and Release)
	15	Wisata perahu kaca (glass boat)
	16	Perahu wisata
	17	Wisata melihat burung
	18	Wisata Budaya
	19	Wisata tracking
	20	Pembuatan foto, video, film untuk tujuan komersial
	21	Penangkapan ikan dengan Jaring insang tetap (Set gill nets (anchored))
	22	Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh usaha menengah keatas
	23	Penangkapan ikan dengan Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal
	24	Penangkapan ikan dengan Lampara dasar
	25	Penangkapan Ikan dengan Kapal 1 - 5 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan
	26	Budidaya Mutiara
	27	Budidaya dengan Keramba Jaring Apung (KJA)
	28	Rumpon
Kegiatan yang tidak diperbolehkan	1	Penangkapan ikan dengan Jaring Pure Sein (Bobo)
	2	Penangkapan ikan dengan Trawl
	3	Penangkapan ikan dengan Bubu
	4	Penangkapan ikan dengan Sero
	5	Penangkapan ikan dengan Rawai Hanyut
	6	Penangkapan ikan dengan Rawai Hiu/Cucut
	8	Menggunakan bahan beracun, kompresor dan bom
	9	Menangkap Ikan Hias
	10	Menangkap, melukai dan membunuh biota yang dilindungi (termasuk penyu, buaya, manta, duyung, hiu, lumba-lumba, dll)
	11	Mengambil dan menjual telur penyu
	12	Pengambilan Karang hidup atau mati
	13	Penambangan Pasir Laut
	14	Pembuangan Limbah dan Sampah

D. Zona Pemanfaatan

1. Rancangan Zonasi dan Koordinat

Zona pemanfaatan di TWP Laut Banda memiliki luasan total 82,49 ha yang tersebar di 3 lokasi. Lokasi-lokasi zona pemanfaatan memiliki potensi pantai pasir putih, terumbu karang,

wall (tubir), dan biota penting lainnya. Lokasi Zona Pemanfaatan TWP Laut Banda dapat dilihat pada Gambar 13.1. Gambar 13.2. dikoordinat batas sebagaimana tersebut pada Tabel 13.

Tabel 13. Titik koordinat zona pemanfaatan

ZONA	Titik Koordinat	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)	Luas (Ha)
		X	Y	
Pemanfaatan	4	129,945395	-4,507918	82.49
	9	129,944971	-4,507446	
	10	129,943620	-4,507396	
	11	129,941283	-4,508862	
	12	129,939237	-4,511578	
	13	129,938882	-4,514555	
	29	129,939345	-4,514695	
	34	129,934338	-4,495246	
	35	129,931951	-4,496113	
	36	129,934854	-4,502962	
	37	129,936351	-4,500239	
	1	129,893281	-4,502507	
	30	129,907085	-4,508027	
	31	129,910094	-4,507322	
	32	129,909390	-4,504537	
33	129,901380	-4,500266		

Zona Pemanfaatan merupakan bagian kawasan konservasi perairan yang letak, kondisi, dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan pariwisata alam perairan dan/atau kondisi/jasa lingkungan serta untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. Zona pemanfaatan mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai daya tarik pariwisata alam berupa biota perairan beserta ekosistem perairan yang indah dan unik;
- b. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensial dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi;
- c. Mempunyai karakter objek penelitian dan pendidikan yang mendukung kepentingan konservasi;
- d. Mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk berbagai kegiatan pemanfaatan dengan tidak merusak ekosistem aslinya;

2. Potensi

Pada Zona Pemanfaatan memiliki potensi terumbu karang yang indah sebagai lokasi wisata bawah air selain itu dikarenakan di lokasi darat terdapat wisata sejarah. Zona pemanfaatan yang ada dalam TWP Laut Banda ini lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan wisata bahari berupa penyelaman, snorkeling, dan wisata air lainnya. Potensi keanekaragaman hayati dan keindahan serta keunikan yang dimilikinya telah menjadi daya Tarik wisata bahari.

Berdasarkan hasil penelitian pada zona pemanfaatan ini, kekayaan keanekaragaman hayatinya terutama jenis ikan cukup tinggi. Zona yang terletak di Mangko Batu masuk dalam 10 tempat yang dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Table berikut memperlihatkan 10 tempat dengan tingkat keanekaragaman hayati tetinggi di Banda berdasarkan hasil survey yang dilakukan CTC dan mitra pada tahun 2012. Keanekaragaman spesies ikan sebagaimana tersebut pada Tabel 14.

Tabel 14. Keanekaragaman spesies ikan di TWP Laut Banda

Nomor Lokasi	Nama Lokasi	Jumlah Spesies Ikan
14	Skaru	232
5	Manukang Timur	229
13	Hatta Utara	215
18	Uring	212
3	Ai Barat	208
4	Ai Utara	204
2	Nailaka	203
1	Run	202
11	Syahrir Timur	201
20	Mangku Batu	201

Selain kekayaan keanekaragaman ikan, zona pemanfaatan ini juga memiliki tingkat keanekaragaman hayati karang yang cukup baik. persentase tutupan karang batu yaitu 34,40% yang

terdiri dari kelompok Acropora 3,64%, dan karang Non-Acropora 30,4%. Komponen yang memiliki nilai persentaseutupan kehadiran tertinggi adalah Soft Coral (SC) dengan nilai 29,7%, sesudah itu patahan karang mati (Rubble) yaitu 24,6%. pada kedalaman 10 meter pertumbuhan karang batu didominasi kelompok Non-Acropora, sedangkan kelompok Acropora sedikit kehadirannya. Karang batu kelompok Non-Acropora yang mendominasi pertumbuhan adalah dari Coral Encrusting (CE) yaitu 16,7% dari jenis Montipora sp. Dijumpai juga komponen Soft Coral (SC) dengan persentaseutupan 8,33%. Secara keseluruhan yang memiliki nilai persentaseutupan kehadiran tertinggi adalah komponen pasir (Sand) yaitu 28,3%, kemudian komponen Sponge (SP) yaitu 22,0%, dan nilai persentase ini merupakan yang tertinggi dari semua lokasi pengamatan untuk komponen Sponge. Tingginya keanekaragaman hayati yang cukup tinggi telah menjadi pertimbangan penting untuk mengalokasinya menjadi zona pemanfaatan dengan penekanan utama pada pemanfaatan untuk pariwisata bahari.

Zona Pemanfaatan merupakan daerah di utara pulau Neira dan di Pulau Pisang. Wilayah ini memiliki perairan yang sangat baik. Tingkat kecerahan tinggi, TDS rendah, dan DO normal. Nutrien di wilayah ini juga cukup rendah, dibandingkan dengan di wilayah lainnya, yang menandakan pengaruh limpasan cemaran dari aktivitas manusia cukup rendah, sehingga cukup baik untuk menopang kehidupan terumbu karang sebagai subjek utama dalam wisata bahari di wilayah TWP Laut Banda.

Secara umum kondisi potensi ekologi di zona pemanfaatan ID zona 403 dengan luasan 53,98 termasuk dalam kategori baik dengan tingkat pemanfaatan kategori tinggi. Kondisi ekologi tersebut terlihat dari indikator atau parameter yang digunakan untuk pemilihan lokasi seperti Persen penutupan karang keras sedang, Kelimpahan dan biomassa ikan tinggi, Rekrutmen tinggi, jenis karang resisten tinggi. Tingkat pemanfaatan tersebut

terlihat dari indikator atau parameter kegiatan pemanfaatan pariwisata yaitu kegiatan menyelam, snorkeling, berjemur.

Kondisi potensi ekologi di zona pemanfaatan ID zona 402 dengan luasan 22,11 ha termasuk dalam kategori baik dengan tingkat pemanfaatan kategori tinggi. Kondisi ekologi tersebut terlihat dari indikator atau parameter yang digunakan untuk pemilihan lokasi seperti persen penutupan karang keras tinggi, kelimpahan dan biomassa ikan tinggi, rekrutmen tinggi, jenis karang resisten tinggi. Tingkat pemanfaatan tersebut terlihat dari indikator atau parameter kegiatan pemanfaatan pariwisata yaitu kegiatan menyelam, snorkeling, berjemur.

Kondisi potensi ekologi di zona pemanfaatan ID zona 401 dengan Luasan 6,38 ha termasuk dalam kategori sedang dengan tingkat pemanfaatan kategori sedang. Kondisi ekologi tersebut terlihat dari indikator atau parameter yang digunakan untuk pemilihan lokasi seperti persen penutupan karang keras sedang, kelimpahan dan biomassa ikan sedang, kelimpahan ikan karnivora tinggi, kekayaan jenis ikan dan karang tinggi. Tingkat pemanfaatan tersebut terlihat dari indikator atau parameter kegiatan pemanfaatan pariwisata yaitu kegiatan menyelam, snorkeling, lintasan kapal, dan kegiatan kearifan lokal yang dilakukan setahun sekali yaitu kegiatan adat mandi belang.

3. Peruntukan/Tujuan Zona

Peruntukan/tujuan zona pemanfaatan di TWP Laut Banda adalah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata bahari berupa penyelaman, snorkeling, dan wisata air lainnya, hal ini didukung dengan kondisi potensi terumbu karang yang indah, kelimpahan sumberdaya ikan dan di lokasi darat terdapat wisata sejarah, karena keindahan serta keunikan yang dimilikinya lokasi di kawasan TWP Laut Banda telah menjadi daya Tarik wisata bahari

4. Kegiatan yang Boleh dan Tidak

Kegiatan yang boleh dan tidak boleh untuk Zona Pemanfaatan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan yang diperbolehkan meliputi : perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; penjagaan dan pencegahan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; pengelolaan jenis sumberdaya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan daya dukung habitatnya; perlindungan alur migrasi biota perairan; pemulihan dan rehabilitasi ekosistem.
- b. Kegiatan pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan meliputi: rekreasi pantai, menyelam; pariwisata tontonan seperti snorkeling dan menggunakan perahu kaca (*glass boat*); pariwisata minat khusus; perahu pariwisata; olahraga permukaan air seperti berenang, memancing *catch and release (catch and release fishing)*, kite surfing, jetsky, dayung/kayak dan jenis olahraga air lainnya; wisata penelitian untuk mendapat pengetahuan terkait bidang ilmu tertentu seperti mengamati kehidupan biota perairan (Ikan, penyu dan lain-lain), formasi kehidupan terumbu karang, burung dan lain-lain; wisata budaya, *tracking* dan pembuatan foto, video dan film.
- c. Pembatasan ukuran kelompok wisatawan yang dapat melakukan kegiatan wisata dalam waktu yang bersamaan dan pembatasan jenis kegiatan dan usaha pariwisata disesuaikan dengan daya dukung kawasan yang dikelola oleh Pengelola TWP;
- d. Pengaturan waktu kegiatan (temporal atau musiman) atau minimisasi tekanan wisata ditetapkan jika diperlukan untuk

- mencegah gangguan pada lokasi pembiakan ikan atau pada proses pemijahan ikan;
- e. Jenis pengusahaan pariwisata yang diperbolehkan yaitu usaha penyediaan jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam.
 - f. Usaha penyediaan jasa wisata alam meliputi: penyediaan jasa paket wisata, transportasi, pramuwisata, makanan dan minuman, dan Informasi pariwisata, yaitu jasa penyediaan paket wisata, sarana dan prasarana transportasi, akomodasi hingga pemanduan di daerah tujuan wisata.
 - g. Usaha penyediaan sarana wisata alam meliputi: Wisata tirta, yaitu sarana dan pelayanan untuk melakukan berbagai kegiatan olah raga air dan wisata tontonan seperti tabung selam, fin, papan selancar dan glass boat; Akomodasi, yaitu sarana dan pelayanan untuk penginapan wisatawan seperti hotel, penginapan/homestay.
 - h. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang diperbolehkan meliputi: penelitian dasar untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi, penelitian terapan untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi, dan pengembangan untuk kepentingan konservasi.
 - i. Ijin penelitian dan pengembangan diberikan oleh Pengelola TWP Laut Banda, tergantung pada terpenuhinya semua persyaratan yang ditetapkan, termasuk persetujuan atas rencana kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut (tertulis) oleh Kepala Pengelola TWP atau pejabat yang ditunjuk.
 - j. Kegiatan yang diperbolehkan di Zona Pemanfaatan untuk pendidikan meliputi: pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati; perlindungan sumberdaya masyarakat lokal; pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari; pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan; promosi pemanfaatan sumber daya

secara berkelanjutan; promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan Taman Wisata Perairan.

- k. Ijin pendidikan diberikan oleh Pengelola TWP Laut Banda, tergantung pada terpenuhinya semua persyaratan yang ditetapkan, termasuk persetujuan atas rencana kegiatan pendidikan tersebut (tertulis) oleh Kepala Pengelola TWP atau pejabat yang ditunjuk.
- l. Alur pelayaran yang diperbolehkan di Zona Pemanfaatan adalah alur pelayaran untuk perhubungan, dan pelayaran selain di alur pelayaran untuk perhubungan.

Kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada Zona Pemanfaatan sebagaimana tersebut dalam Tabel 15.

Tabel 15. Perumusan kegiatan yang boleh dan tidak boleh pada Zona Pemanfaatan

Perumusan Kegiatan	No	Kegiatan
Kegiatan yang diperbolehkan	1	Patroli pengawasan
	2	Tambatan perahu
	3	Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (kantor)
	4	Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (Pos Jaga, Jetty)
	5	Pembuatan foto, video, film untuk tujuan non komersial
	6	Alur Kapal untuk perhubungan
	7	Pelayaran selain di alur kapal untuk perhubungan
Kegiatan yang diperbolehkan tetapi dengan izin	1	Monitoring dan Penelitian non ekstraktif
	2	Monitoring dan Penelitian ekstraktif
	3	Pendidikan pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati (ekosistem lamun, terumbu dan laut dalam); perlindungan sumberdaya masyarakat lokal; pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari; pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan; promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan
	4	Pembangunan Infrastruktur wisata hotel, home stay, dan sarana penginapan lainnya
	5	Pembangunan Infrastruktur wisata (resor

Perumusan Kegiatan	No	Kegiatan
		permanen)
	6	Sarana dan pelayanan untuk melakukan wisata petualangan (kapal layar (cruise), kapal selam, sea walker, penenggelaman kapal (ship wreck)
	7	Rekreasi pantai
	8	Wisata menyelam
	9	Wisata snorkeling
	10	Wisata Jet Ski
	11	Wisata Kayak/Dayung
	12	Wisata Surfing
	13	Wisata Kite surfing
	14	Wisata Mancing (Catch and Release)
	15	Wisata perahu kaca (glass boat)
	16	Perahu wisata
	17	Wisata melihat Paus dan Lumba-Lumba
	18	Wisata melihat burung
	19	Wisata Hutan
	20	Wisata Budaya
	21	Wisata tracking
	22	Pembuatan foto, video, film untuk tujuan komersial
Kegiatan yang tidak diperbolehkan	1	Penangkapan ikan dengan Jaring insang tetap (Set gill nets (anchored))
	2	Penangkapan ikan dengan Jaring insang hanyut (Drift nets)
	3	Penangkapan ikan dengan Jaring insang oseanik
	4	Penangkapan ikan dengan Jaring angkat (Lift Net)
	5	Penangkapan ikan dengan Jaring serok (scoop net)
	6	Penangkapan ikan dengan Bagan Tancap (bamboo platform lift net)
	7	Penangkapan ikan dengan Bagan Perahu/rakit (Boat/raft lift net)
	8	Penangkapan ikan dengan Bubu
	9	Penangkapan ikan dengan Pancing ulur
	10	Penangkapan ikan dengan Pancing tonda
	11	Penangkapan ikan dengan Pancing layang-layang
	12	Penangkapan ikan dengan Sero
	13	Penangkapan ikan dengan Jermal
	14	Penangkapan ikan dengan Rawai Tuna
	15	Penangkapan ikan dengan Rawai Hanyut

Perumusan Kegiatan	No	Kegiatan
	16	Penangkapan ikan dengan Rawai Tetap
	17	Penangkapan ikan dengan Rawai Hiu/Cucut
	18	Penangkapan ikan dengan Huhate
	19	Bameti (dengan alat dan cara yang tidak merusak terumbu karang)
	20	Pemasangan Rumpon
	21	Rumpon telur ikan terbang
	22	Menggunakan bahan beracun, kompresor dan bom
	23	Menangkap Ikan Hias
	24	Menangkap ikan dengan senapan dan tombak
	25	Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan artisanal serta kelompok nelayan yang secara ekonomis memiliki struktur dan unit usaha kecil yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha penangkapan ikan
	26	Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh usaha menengah keatas
	27	Penangkapan ikan dengan Pukat cincinpelagis kecil dan pelagis besar dengan satu kapal
	28	Penangkapan ikan dengan Lampara dasar
	29	Penangkapan Ikan dengan Kapal 5 - 30 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan
	30	Penangkapan Ikan dengan Kapal < 5 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan
	31	Menangkap, melukai dan membunuh biota yang dilindungi (termasuk penyu, buaya, manta, duyung, hiu, paus, lumba-lumba, dll)
	32	Mengambil dan menjual telur penyu
	33	Budidaya Rumput Laut
	34	Budidaya Mutiara
	35	Budidaya dengan Keramba Jaring Apung (KJA)
	36	Pengambilan Karang hidup atau mati
	37	Penambangan Pasir Laut
	38	Pembuangan Limbah dan Sampah

E. Zona Rehabilitasi

1. Rancangan Zonasi dan Koordinat

Zona Rehabilitasi merupakan zona di luar zona Inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang dikarenakan fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona lainnya. Zona rehabilitasi di TWP Laut banda memiliki luas sebesar 28,94 ha.

Lokasi Zona Rehabilitasi TWP Laut Banda dapat dilihat pada Gambar 13.1. dengan koordinat batas sebagaimana tersebut pada Tabel 16.

Tabel 16. Titik Koordinat Zona Rehabilitasi TWP Laut Banda

ZONA	Titik Koordinat	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)	Luas (Ha)
		X	Y	
Zona Rehabilitasi	38	129,889336	-4,538279	28.94
	39	129,889477	-4,540574	
	40	129,879346	-4,540892	
	41	129,879241	-4,538526	

Kondisi biofisik di zona rehabilitasi cukup memperhatikan, hal ini dapat dilihat dari kondisi terumbu karang yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Hamparan bekas – bekas Terumbu karang yang rusak cukup luas dan sebagian besar lain pada zona ini didasar laut berupa pasir. Kerusakan – kerusakan habitat terumbu karang pada zona ini disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan manusia. Diduga kusakan yang diakibatkan oleh aktivitas membuang jangkar (buang sauh) dari kapal atau perahu yang biasanya berlabuh pada wilayah tersebut, penyebab lainnya adanya aktifitas pemanfaatan berupa pengambilan karang dan bameti yaitu mengambil hasil laut berupa kerang-kerangan dengan cara mencungkil karang dan menginjak karang saat air laut surut.

2. Potensi

Zona ini berada ditengah tengah antara kawasan zona budidaya rumput laut. Kecerahan di wilayah ini cukup baik, berkisar antara 60-100%, tergantung arah arus. DO juga baik, berkisar antara 8, diduga berasal dari arah arus yang membawa oksigen terlarut dari hasil fotosintesis dari lamun yang banyak berada di wilayah utara pulau Banda-Besar. Namun TDS dan nitrogen cukup tinggi di wilayah ini.

Kondisi bio-fisik berupa keanekaragaman hayati laut baik ikan, karang dan padang lamun di waktu lalu cukup baik. Bahkan berdasarkan hasil survey 2002 yang dilakukan TNC dan mitra, kondisi terumbu karang pada wilayah ini cukup baik dengan tingkat keanekaragaman karangnya yang cukup tinggi. Namun kondisi tersebut dalam 10 tahun terakhir mengalami degradasi yang cukup parah. Kerusakan habitat seperti terumbu karang dan padang lamun telah berpengaruh pada hasil tangkapan nelayan khususnya beberapa jenis ikan baik ikan karang maupun ikan pelagic kecil lainnya termasuk juga beberapa jenis kerang-kerangan. Bahkan beberapa jenis kerang-kerangan yang dahulu merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat di sekitar TWP Laut Banda saat ini hamper tidak ditemukan lagi. Kondisi tersebut membuat wilayah ini ditetapkan seagai zona rehabilitasi. Diharapkan dengan melakukan rehabilitasi pada zona ini secara perlahan akan bisa mengembalikan kondisi biofisik terutama habitat terumbu karang bisa kembali pulih dan akan mengembalikan kembali potensi perikanan yang selama ini telah berkurang jauh di dalam zona tersebut. Rehabilitasi terhadap zona ini juga tentu saja akan memberikan dampak ekonomi bagi nelayan pesisir yang ada di dalam kawasan dan juga mengurangi tekanan pada zona lain seperti zona perikanan tradisional.

3. Peruntukan/Tujuan Zona

Peruntukan zona rehabilitasi yaitu rehabilitasi terumbu karang, dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi ekosistem terumbu karang yang telah rusak akibat aktifitas penangkapan yang tidak

ramah lingkungan sehingga mendekati kondisi ekosistem alamiahnya.

Kondisi perairan di zona rehabilitasi sangat mendukung untuk pemulihan ekosistem terumbu karang, sehingga pemilihan lokasi tersebut sangat sesuai sehingga mendukung untuk memperbaiki terhadap perubahan fisik, sifat fisik dan hayati yang secara ekologi berpengaruh kepada kelestarian ekosistem di dalam kawasan konservasi TWP Laut Banda.

4. Kegiatan yang Boleh dan Tidak

Kegiatan yang diperbolehkan dalam zona rehabilitasi yang disajikan pada tabel 2 yaitu:

- a. Kegiatan Penelitian;
- b. Kegiatan Pendidikan;
- c. Wisata Berenang;
- d. Wisata Snorekling;
- e. Wisata Menyelam (*Diving*).

Kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam zona rehabilitasi yaitu :

- a. Pancing tonda;
- b. Jaring trawl;
- c. Jaring muroami;
- d. Jaring hela;
- e. Jaring bobo;
- f. Jaring insang;
- g. Jaring dasar;
- h. Pancing rawai dasar;
- i. Pancing tonda;
- j. Pancing ulur;
- k. Bubu dasar;
- l. Budidaya;
- m. Pembangunan (Pos Apung dan dermaga);
- n. Keramba ikan;
- o. Rumpon;
- p. Berlabuh (Kapasitas Kapal > 10 GT);
- q. Bom dan penggunaan bahan beracun.

BAB IV RENCANA JANGKA PANJANG

A. Kebijakan dan Strategi Konservasi Perairan

1. Kebijakan dan Strategi Konservasi Perairan Nasional

Pengelolaan kawasan konservasi perairan tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya ikan secara keseluruhan. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya melindungi melestarikan dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Sebagai upaya konservasi wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pemerintah melakukan kebijakan antara lain, ditetapkannya target nasional yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan *Convention on Biological Diversity* (CBD) di Brazil tahun 2006, yaitu pencaanangan Kawasan Konservasi Laut seluas 10 juta hektar pada tahun 2010 dan 20 juta hektar pada tahun 2020.

Pertemuan puncak dunia mengenai pembangunan berkelanjutan di Johannesburg pada tahun 2002 mendeklarasikan bahwa, “Samudera, laut, pulau, dan wilayah pantai merupakan satu komponen terpadu dan essensial dari ekosistem bumi yang sangat penting bagi ketersediaan pangan global yang aman untuk menjaga kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan ekonomi banyak Negara, terutama di negara-negara berkembang. Pembangunan samudera yang berkelanjutan membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang efektif, termasuk pada tingkat global dan regional, diantara badan-badan yang berkepentingan dan tindakan-tindakan di segala tingkatan”.

Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan sumber daya alam tersebut menunjukkan prinsip-prinsip yang sangat mendasar dan harmonisasi antara keseimbangan, keselarasan dan keserasian sistem ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Pembangunan yang semata-mata menempatkan sistem dan fungsi ekonomi sebagai prioritas dan mengabaikan fungsi ekologi, sosial dan budaya akan menimbulkan masalah-masalah yang pelik dan konflik sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya pemerintah

untuk membangun dan mengembangkan keseimbangan fungsi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya harus dapat terimplementasikan dalam berbagai perangkat kebijakan maupun program pemerintah.

2. Arah Kebijakan Daerah

Kebijakan regional atau daerah mengenai pengelolaan kawasan konservasi perairan dituangkan dalam peraturan daerah dan peraturan bupati. Secara lebih rinci berikut dipaparkan poin penting arah kebijakan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2012, Penataan ruang wilayah kabupaten Maluku tengah bertujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui pengembangan kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, jasa-jasa dan pertambangan sesuai dengan kemampuan daya dukung wilayah serta mewujudkan program *multi gate system* di kabupaten maluku tengah yang dapat membuka akses bagi peningkatan pembangunan di wilayah kabupaten Maluku tengah.

Banda neira sebagai ibu kota kecamatan berdasarkan Struktur Ruang Wilayah dalam RTRW kabupaten Maluku tengah merupakan Pusat Kegiatan Strategis Provinsi (PKSP) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, yang diarahkan menjadi pusat kegiatan wilayah atau PKW. Berdasarkan pola ruang wilayah Kecamatan Kepulauan Banda termasuk dalam pola ruang kawasan lindung dan budidaya yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pola ruang untuk kawasan lindung yang terdiri dari:
 - 1) Cagar Alam Laut Banda/ Taman Wisata Perairan Laut (2500 ha);
 - 2) Suaka Margasatwa Pulau Manuk.
- b. Pola Ruang untuk kawasan pelestarian alam yang terdiri dari Taman Wisata Alam Gunung Api Banda
- c. Pola Ruang Untuk Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan:
 - 1) kawasan lingkungan non bangunan;

- 2) kawasan lingkungan bangunan non gedung;
 - 3) lingkungan bangunan gedung dan halamannya;
 - 4) kawasan rawan bencana alam gelombang pasang; dan
 - 5) kawasan rawan bencana geologi letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami dan gas beracun.
- d. Pola ruang untuk kawasan budidaya meliputi:
- 1) kawasan perkebunan dan hortikultura (pala);
 - 2) kawasan pesisir dan perikanan (perikanan tangkap dan budidaya laut);
 - 3) kawasan berbasis kompetensi daerah yaitu perikanan;
 - 4) kawasan industri kecil dan menengah (IKM) minyak atsiri;
 - 5) kawasan IKM berbagai makanan tepung dari padi-padian, kacang-kacangan dan ubi-ubian;
 - 6) kawasan IKM makanan olahan hasil perikanan;
 - 7) kawasan IKM pengasinan/pemanisan buah-buahan; dan
 - 8) kawasan pariwisata (alam pantai, budaya dan minat khusus).

B. Visi dan Misi

Visi TWP Laut Banda adalah “Taman Wisata Laut Banda sebagai tujuan wisata nasional dengan tetap mempertahankan keanekaragaman hayati laut dan kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat”. Sedangkan misi yang ditetapkan untuk mencapai visi TWP Laut Banda, meliputi:

1. memantapkan sistem pengelolaan TWP Laut Banda yang berbasis ekosistem, kehati-hatian, keterpaduan, adaptif dan partisipatif;
2. mengembangkan upaya pemanfaatan sumberdaya laut di TWP Laut Banda secara optimal dan berkelanjutan; dan
3. merevitalisasi praktek-praktek kearifan lokal dalam mendukung pengelolaan TWP Laut Banda yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

C. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah melakukan upaya-upaya pengelolaan dalam rangka mewujudkan TWP Laut Banda sebagai tujuan wisata

nasional dengan tetap mempertahankan keanakeragaman hayati laut dan kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat.

Sasararan pengelolaan adalah sebagai berikut:

1. terselenggaranya sistem pengelolaan TWP Laut Banda yang berbasis ekosistem, kehatia-hatian, keterpaduan, adaptif dan partisipatif;
2. termanfaatkannya sumberdaya laut di TWP Laut Banda secara optimal dan berkelanjutan; dan
3. terlaksananya praktek-praktek kearifan lokal dalam mendukung pengelolaan TWP Laut Banda serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

D. Strategi Pengelolaan

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pengelolaan, serta isu/permasalahan di TWP Laut Banda, maka strategi pengelolaan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pengelolaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan sebuah kawasan konservasi terletak pada keberadaan lembaga pengelola yang kuat serta kemampuan dan kapasitas lembaga pengelola tersebut dalam mengelola kawasan. Lembaga pengelola yang handal diharapkan dapat menjadi motor penggerak maupun pelaksana program dan kegiatan dalam pengelolaan kawasan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan. Faktor lain dalam menunjang keberhasilan pengelolaan kawasan adalah meningkatnya kemampuan dan kapasitas para pihak terkait pengelolaan kawasan. Diketahui bahwa banyak pihak berkepentingan terhadap kawasan TWP dengan persepsi dan kemampuan yang berbeda-beda. Adanya persepsi positif terhadap kawasan dan kemampuan yang memadai untuk terlibat dalam pengelolaan akan menjadi modal berharga untuk keberhasilan pengelolaan kawasan.

Strategi penguatan kelembagaan akan dilakukan melalui program antara lain:

- a. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- b. penata kelolaan kelembagaan;
- c. penata kelolaan kawasan;

- d. pengembangan kemitraan atau kolaborasi pengelolaan;
- e. pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

2. Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan

Pengelolaan sumberdaya alam maupun sumberdaya sosial, budaya, dan ekonomi di kawasan TWP Laut Banda penting dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan status dan fungsinya. Kelestarian sumberdaya alam serta terpeliharanya kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat disekitarnya merupakan tolak ukur keberhasilan pengelolaannya. Pengelolaan sumber daya seperti ikan penting selain untuk menjamin kelestariannya, juga menjamin sumber protein dan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitarnya. Pengelolaan terumbu karang penting untuk tetap mempertahankan Taman Wisata Perairan Laut Banda sebagai daya tarik dan tujuan wisata.

Strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan akan dilakukan melalui program antara lain:

- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan; dan
- c. penelitian dan pengembangan

3. Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Strategi ini semua berkaitan dengan pengembangan komunitas di sekitar kawasan, agar dapat hidup berdampingan dengan alam pada kawasan yang menjadi kawasan konservasi. Kunci dari strategi pengembangan sosekbud di sekitar kawasan adalah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, penghormatan terhadap hak tradisional dan adat-budaya masyarakat serta pemberdayaan masyarakat.

Strategi penguatan sosial, ekonomi dan budaya kawasan akan dilakukan melalui program antara lain:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pelestarian adat dan budaya.

BAB V

RENCANA JANGKA MENENGAH

A. Umum

Rencana pengelolaan jangka menengah TWP Laut Banda berlaku selama 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pengelolaan jangka panjang. Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan sebuah kawasan konservasi terletak pada keberadaan lembaga pengelola yang kuat serta kemampuan dan kapasitas lembaga pengelola tersebut dalam mengelola kawasan. Lembaga pengelola yang handal diharapkan dapat menjadi motor penggerak maupun pelaksana program dan kegiatan dalam pengelolaan kawasan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan. Faktor lain dalam menunjang keberhasilan pengelolaan kawasan adalah meningkatnya kemampuan dan kapasitas para pihak terkait pengelolaan kawasan.

Pengelolaan sumberdaya alam TWP Laut Banda dilakukan tidak hanya melalui perlindungan dan rehabilitasi, juga melalui pemanfaatan sumberdaya secara lestari baik untuk kepentingan masyarakat maupun kepentingan lainnya. Upaya perlindungan dan rehabilitasi guna menjamin kelestarian sumberdaya, sedangkan upaya pemanfaatan secara lestari guna memberikan manfaat dari potensi sumberdaya.

Disamping itu, sistem sosial dan budaya masyarakat perlu dipertahankan dan dikembangkan sebagai bagian dari asset dan dukungan dalam pengelolaan kawasan. Hal penting lainnya adalah pengelolaan kawasan harus memberikan manfaat bagi masyarakat baik untuk kebutuhan hidup maupun ekonomi.

Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan TWP Laut Banda adalah kelestarian sumberdaya yang dikelola. Untuk itu pemantauan dan evaluasi status sumber daya perlu dilakukan secara teratur untuk memastikan apakah upaya pengelolaan yang telah dan akan dilakukan kedepannya sesuai dengan yang diharapkan.

Evaluasi merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai apakah kegiatan pengelolaan TWP yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi berarti juga

menemukan/mencari kendala dalam kegiatan pengelolaan, analisis permasalahan, serta menemukan jalan pemecahannya. Dokumen hasil pemantauan yang dilakukan di atas merupakan bahan utama evaluasi. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun sekali, yang hasilnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan TWP Laut Banda pada tahun berikutnya.

B. Rencana Jangka Menengah I (5 tahun pertama)

Rencana jangka menengah pengelolaan kawasan konservasi perairan berlaku selama 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran pengelolaan, dan strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan meliputi penguatan kelembagaan, penguatan pengelolaan sumber daya kawasan, dan/atau penguatan sosial, ekonomi, dan budaya.

1. Penguatan Kelembagaan

Strategi penguatan kelembagaan dalam mengelola TWP Laut Banda dijabarkan sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Tim Konservasi Laut Banda termasuk SATKER TWP Laut Banda, meliputi:

- a) Pelatihan Prinsip-Prinsip Dasar Kawasan Konservasi Perairan (KKP);
- b) Pelatihan Perancangan Kawasan Konservasi Perairan;
- c) Pelatihan Pengelolaan KKP yang Efektif dan pengelolaan yang adaptif;
- d) Pelatihan Selam Ilmiah dan Pengenalan Ekosistem dan Biota penting pesisir dan laut;
- e) Studi banding atau kunjungan ke KKP lain yang telah dikelola dengan baik;
- f) Pelatihan Teknik Fasilitasi; dan
- g) Pelatihan Patroli dan Penegakan Hukum.

2) Pendidikan dan pelatihan kegiatan pariwisata bagi masyarakat setempat, meliputi:

- a) Pelatihan kegiatan pariwisata berkelanjutan dan ekowisata bahari;
- b) Pelatihan pengelolaan sampah dan limbah.

- b. Penatakelolaan kelembagaan melalui:
 - 1) Penyusunan SOP tentang administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan;
 - 2) Penyusunan SOP tentang sarana prasarana;
 - 3) Penyusunan SOP tentang patroli bersama;
 - 4) Penyusunan SOP monitoring sosio-ekonomi;
 - 5) Penyusunan SOP monitoring biofisik;
 - 6) Penyusunan SOP pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan;
 - 7) Penyusunan SOP tentang pelaksanaan kegiatan budidaya; dan
 - 8) Penyusunan SOP tentang pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap.
- c. Penatakelolaan kawasan melalui:
 - 1) Penataan batas kawasan, meliputi:
 - a) Rekonstruksi batas luar kawasan;
 - b) Rekonstruksi tata batas zonasi;
 - c) Pembuatan papan informasi batas kawasan dan zonasi; dan
 - d) Evaluasi zonasi (setiap lima tahun).
 - 2) Pembuatan rencana pengelolaan kawasan
 - a) Pembuatan dan finalisasi rencana pengelolaan jangka panjang (20 tahun) TWP Laut Banda;
 - b) Pembuatan rencana pengelolaan jangka menengah (5 tahun) TWP Laut Banda;
 - c) Pembuatan rencana kerja tahunan TWP Laut Banda.
- d. Pengembangan kemitraan atau kolaborasi pengelolaan, melalui:
 - 1) Kerja sama dengan pihak lain untuk program monitoring sumber daya alam:
 - a) Kerja sama dengan Perguruan Tinggi, LIPI, LSM untuk melaksanakan monitoring ekosistem penting pesisir terumbu karang, ikan, mangrove dan padang lamun;
 - b) Kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan LSM untuk program monitoring sosial ekonomi.
 - 2) Pembentukan dan penguatan tim konservasi laut Banda; dan
 - 3) Pembentukan mekanisme pengelolaan kolaborasi.
- e. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan, melalui:

- 1) Survei terkait potensi income guna pendanaan berkelanjutan TWP Laut Banda;
 - 2) Kajian kebijakan terkait biaya masuk TWP Laut Banda.
- f. Monitoring dan Evaluasi:
- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP;
 - 2) Evaluasi efektivitas Pengelolaan; dan
 - 3) Evaluasi kelembagaan.
2. Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan, melalui:
- a. Perlindungan habitat dan populasi ikan dilakukan dengan:
 - 1) Monitoring terumbu karang dan ikan
 - 2) Pembentukan tim patroli bersama dan SOP patrol
 - 3) Pengadaan sarana dan prasarana guna pelaksanaan patroli, monitoring habitat/ikan, penyuluhan, pelampung tambat (*mooring buoy*)
 - b. Rehabilitasi habitat dan populasi ikan:
 - 1) Rehabilitasi terumbu karang;
 - 2) Rehabilitasi padang lamun
 - c. Penelitian dan pengembangan:
 - 1) Monitoring ekosistem terumbu karang
 - 2) Monitoring ekosistem padang lamun
 - 3) Monitoring *Spawning Agregation Site* (SPAGs) *for fish*;
 - 4) Monitoring Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Laut di TWP Laut Banda (Sosial);
 - 5) Monitoring Persepsi para pihak terkait pengelolaan TWP Laut Banda (Sosial); dan
 - 6) Monitoring spesies kunci di TWP Laut Banda seperti Napoleon, Cetasea, Hiu, dan Penyu.
3. Penguatan Sosial Ekonomi dan Budaya melalui:
- a. Pemberdayaan masyarakat
 - 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - a) Pengembangan mata pencaharian alternatif yang berwawasan konservasi;
 - b) Pengembangan koperasi simpan pinjam atau serba guna
 - 2) Peningkatan kesadaran masyarakat
 - a) Kampanye penyadaran terkait konservasi laut;

- b) Pembuatan berbagai media penyuluhan (poster, film, lembar informasi);
 - c) Pembuatan pusat informasi pariwisata bahari.
 - b. Pelestarian adat dan budaya berupa kegiatan Penguatan sistem sasi dan pengelolaan pesisir dan laut berbasis lokal (LMMA).
- C. Rencana Jangka Menengah II (5 tahun kedua)

Rencana jangka menengah II (5 tahun kedua) dilakukan dengan:

 1. Penguatan Kelembagaan:
 - a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Tim Konservasi Laut Banda termasuk SATKER TWP Laut Banda;
 - 2) Studi banding atau kunjungan ke KKP lain yang telah dikelola dengan baik;
 - 3) Pelatihan Tehnik Fasilitasi;
 - 4) Pelatihan Patroli dan Penegakan Hukum;
 - b. Pendidikan dan pelatihan kegiatan pariwisata bagi masyarakat setempat:
 - 1) Pelatihan kegiatan pariwisata berkelanjutan dan ekowisata bahari
 - 2) Pelatihan pengelolaan sampah dan limbah
 - c. Penatakelolaan kelembagaan:
 - 1) Penyusunan SOP tentang administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan;
 - 2) Penyusunan SOP tentang sarana prasarana.
 - d. Penatakelolaan kawasan:
 - 1) Penataan batas kawasan:
 - a) Rekonstruksi batas luar kawasan;
 - b) Rekonstruksi tata batas zonasi;
 - c) Pembuatan papan informasi batas kawasan dan zonasi;
 - d) Evaluasi zonasi (setiap lima tahun);
 - 2) Pembuatan rencana pengelolaan kawasan:
 - a) Pembuatan rencana pengelolaan jangka menengah (5 tahun) TWP Laut Banda;
 - b) Pembuatan rencana kerja tahunan TWP Laut Banda.

- e. Pengembangan kemitraan atau kolaborasi pengelolaan
 - 1) Kerja sama dengan pihak lain untuk program monitoring sumber daya alam:
 - a) Kerja sama dengan Perguruan Tinggi, LIPI, LSM untuk melaksanakan monitoring ekosistem penting pesisir terumbu karang, ikan, mangrove dan padang lamun;
 - b) Kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan LSM untuk program monitoring sosial ekonomi;
 - 2) Pembentukan dan penguatan tim konservasi laut Banda berupa kegiatan Koordinasi rutin dengan *stakeholder*.
 - f. Monitoring dan Evaluasi:
 - 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP;
 - 2) Evaluasi efektivitas Pengelolaan; dan
 - 3) Evaluasi kelembagaan.
2. Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan
- a. Perlindungan habitat dan populasi ikan
 - 1) Monitoring terumbu karang dan ikan;
 - 2) Pembentukan tim patroli bersama dan SOP patrol.
 - b. Rehabilitasi habitat dan populasi ikan
 - 1) Rehabilitasi terumbu karang;
 - 2) Rehabilitasi padang lamun.
 - c. Penelitian dan pengembangan:
 - 1) monitoring ekosistem terumbu karang;
 - 2) monitoring ekosistem padang lamun.
 - 3) monitoring Persepsi para pihak terkait pengelolaan TWP Laut Banda (Sosial)
 - 4) monitoring spesies kunci di TWP Laut Banda seperti Napoleon, Hiu dan Penyu
3. Penguatan Sosial Ekonomi dan Budaya
- Pada tahapan ini, kegiatan pendukung penguatan Sosial Ekonomi dan Budaya hanya berupa Pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari:

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat:
 - 1) Pengembangan mata pencaharian alternatif yang berwawasan konservasi;
 - 2) Pengembangan koperasi simpan pinjam atau serba guna;
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat
 - 1) Kampanye penyadaran terkait konservasi laut;
 - 2) Pembuatan berbagai media penyuluhan (poster, film, lembar informasi);
 - 3) Pembuatan pusat informasi pariwisata bahari.
- c. Pengembangan kemitraan atau kolaborasi pengelolaan:
 - 1) Kerja sama dengan pihak lain untuk program monitoring sumber daya alam:
 - a) Kerja sama dengan Perguruan Tinggi, LIPI, LSM untuk melaksanakan monitoring ekosistem penting pesisir terumbu karang, ikan, mangrove dan padang lamun;
 - b) Kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan LSM untuk program monitoring sosial ekonomi
 - 2) Pembentukan dan penguatan tim konservasi laut Banda berupa kegiatan Koordinasi rutin dengan stakeholder
- d. Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP;
 - 2) Evaluasi efektivitas Pengelolaan; dan
 - 3) Evaluasi kelembagaan.

D. Rencana Jangka Menengah III (5 tahun ketiga)

- 1. Penguatan Kelembagaan:
 - a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Tim Konservasi Laut Banda termasuk SATKER TWP Laut Banda:
 - a) Studi banding atau kunjungan ke KKP lain yang telah dikelola dengan baik;
 - b) Pelatihan Teknik Fasilitasi
 - c) Pelatihan Patroli dan Penegakan Hukum
 - 2) Pendidikan dan pelatihan kegiatan pariwisata bagi masyarakat setempat:

- a. Pelatihan kegiatan pariwisata berkelanjutan dan ekowisata bahari
 - b. Pelatihan pengelolaan sampah dan limbah
 - b. Penatakelolaan kelembagaan
 - 1) Penyusunan SOP tentang administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan; dan
 - 2) Penyusunan SOP tentang sarana prasarana.
 - c. Penatakelolaan kawasan:
 - 1) Penataan batas kawasan:
 - a) Rekonstruksi batas luar kawasan;
 - b) Rekonstruksi tata batas zonasi;
 - c) Pembuatan papan informasi batas kawasan dan zonasi; dan
 - d) Evaluasi zonasi (setiap lima tahun)
 - d. Pembuatan rencana pengelolaan kawasan
 - 1) Pembuatan rencana pengelolaan jangka menengah (5 tahun) TWP Laut Banda;
 - 2) Pembuatan rencana kerja tahunan TWP Laut Banda.
- 2. Penguatan Pengelolaan Sumberdaya Kawasan:
 - a. Perlindungan habitat dan populasi ikan:
 - 1) Monitoring terumbu karang dan ikan; dan
 - 2) Pembentukan tim patroli bersama dan SOP patrol.
 - b. Rehabilitasi habitat dan populasi ikan:
 - 1) Rehabilitasi terumbu karang;
 - 2) Rehabilitasi padang lamun.
 - c. Penelitian dan pengembangan:
 - 1) Monitoring ekosistem terumbu karang;
 - 2) Monitoring ekosistem padang lamun;
 - 3) Monitoring Persepsi para pihak terkait pengelolaan TWP Laut Banda (Sosial);
 - 4) Monitoring spesies kunci di TWP Laut Banda seperti Napoleon, Cetasea, Hiu dan Penyu.

3. Penguatan Sosial Ekonomi dan Budaya

Pada tahapan ini, kegiatan pendukung penguatan Sosial Ekonomi dan Budaya hanya berupa Pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari:

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat:
 - 1) Pengembangan mata pencaharian alternatif yang berwawasan konservasi;
 - 2) Pengembangan koperasi simpan pinjam atau serba guna.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat:
 - 1) Kampanye penyadaran terkait konservasi laut;
 - 2) Pembuatan berbagai media penyuluhan (poster, film, lembar informasi);
 - 3) Pembuatan pusat informasi pariwisata bahari.

E. Rencana Jangka Menengah IV (5 tahun keempat)

1. Penguatan Kelembagaan:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Tim Konservasi Laut Banda termasuk SATKER TWP Laut Banda:
 - a) Studi banding atau kunjungan ke KKP lain yang telah dikelola dengan baik;
 - b) Pelatihan Teknik Fasilitasi.
 - c) Pelatihan Patroli dan Penegakan Hukum
- b. Pendidikan dan pelatihan kegiatan pariwisata bagi masyarakat setempat:
 - 1) Pelatihan kegiatan pariwisata berkelanjutan dan ekowisata bahari;
 - 2) Pelatihan pengelolaan sampah dan limbah.
- c. Penatakelolaan kelembagaan:
 - 1) Penyusunan SOP tentang administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan;
 - 2) Penyusunan SOP tentang sarana prasarana
- d. Penatakelolaan kawasan:
 - 1) Penataan batas kawasan:
 - a. Rekonstruksi batas luar kawasan;
 - b. Rekonstruksi tata batas zonasi;
 - c. Pembuatan papan informasi batas kawasan dan zonasi;

- d. Evaluasi zonasi (setiap lima tahun).
 - 2) Pembuatan rencana pengelolaan kawasan:
 - a. Pembuatan rencana pengelolaan jangka menengah (5 tahun) TWP Laut Banda;
 - b. Pembuatan rencana kerja tahunan TWP Laut Banda.
2. Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan:
- a. Perlindungan habitat dan populasi ikan:
 - 1) Monitoring terumbu karang dan ikan;
 - 2) Pembentukan tim patroli bersama dan SOP patrol.
 - b. Rehabilitasi habitat dan populasi ikan:
 - 1) Rehabilitasi terumbu karang;
 - 2) Rehabilitasi padang lamun.
 - c. Penelitian dan pengembangan:
 - 1) Monitoring ekosistem terumbu karang;
 - 2) Monitoring ekosistem padang lamun;
 - 3) Monitoring Persepsi para pihak terkait pengelolaan TWP Laut Banda (Sosial);
 - 4) Monitoring spesies kunci di TWP Laut Banda seperti Napoleon, Cetasea, Hiu dan Penyu.
3. Penguatan Sosial Ekonomi dan Budaya
- Pada tahapan ini, kegiatan pendukung penguatan Sosial Ekonomi dan Budaya hanya berupa Pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari:
- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - 1) Pengembangan mata pencaharian alternatif yang berwawasan konservasi; dan
 - 2) Pengembangan koperasi simpan pinjam atau serba guna.
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat
 - 1) Kampanye penyadaran terkait konservasi laut; dan
 - 2) Pembuatan berbagai media penyuluhan (poster, film, lembar informasi).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya telah disusun rencana pengelolaan selama 20 tahun untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Strategi, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 20 tahun, yakni untuk rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan pada RJM I, RJM II, RJM III, dan RJM IV, sebagaimana terlihat pada Tabel 17.

TABEL 22. Strategi, Program dan Sub Program Rencana Jangka Menengah (RJM) I, II, III, dan IV Pengelolaan TWP Pulau Banda

No	Strategi	Program	Sub-Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Rencana Jangka Menengah (RJM)							
						I (2014-2019)					II (2019-2024)	III (2024-2029)	IV (2029-2034)
						1	2	3	4	5			
1	Strategi Penguatan Kelembagaan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pendidikan dan Pelatihan bagi Tim Konservasi Laut Banda termasuk SATKER TWP Laut Banda	Pelatihan Prinsip-Prinsip Dasar Kawasan Konservasi Perairan (KKP)	Meningkatnya pengetahuan dan jumlah staff balai tentang pengelolaan kawasan konservasi	x	x	X					
				Pelatihan Perancangan Kawasan Konservasi Perairan	Meningkatnya pengetahuan staff tentang merancang kawasan konservasi	x	x						
				Pelatihan Pengelolaan KKP yang Efektif dan pengelolaan yang adaptif	Meningkatnya pengetahuan staff tentang mengelola kawasan konservasi yang optimum	x	x	x	x	x			
				Pelatihan Selam Ilmiah dan Pengenalan Ekosistem dan Biota penting pesisir dan laut	Meningkatnya pengetahuan staff dalam penyelaman dan mengenal eksositem biota pesisir	x	x						
				Studi banding atau kunjungan ke KKP lain yang telah dikelola	Meningkatnya pengetahuan staff tentang mengelola kawasan konservasi yang optimum	x					x	x	x

No	Strategi	Program	Sub-Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Rencana Jangka Menengah (RJM)							
						I (2014-2019)					II (2019-2024)	III (2024-2029)	IV (2029-2034)
						1	2	3	4	5			
				dengan baik									
				Pelatihan Tehnik Fasilitasi	Meningkatnya pengetahuan staff	x		X		x	x	x	x
				Pelatihan Patroli dan Penegakan Hukum	Meningkatnya pengetahuan staff tentang penegakan hukum		x		x		x	x	x
			Pendidikan dan pelatihan kegiatan pariwisata bagi masyarakat setempat	Pelatihan kegiatan pariwisata berkelanjutan dan ekowisata bahari	Meningkatnya pengetahuan staff tentang pariwisata berkelanjutan	x		X		x	x	x	x
				Pelatihan pengelolaan sampah dan limbah	Meningkatnya pengetahuan staff tentang pengelolaan sampah dan limbah	x	x	X	x	x	x	x	x
		Penatakelola-an kelembagaan	Penyusunan Standar Operasional prosedur pengelolaan	Penyusunan SOP tentang administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan	Terlaksanannya kegiatan sesuai SOP	x				x	x	x	x
				Penyusunan SOP tentang sarana prasarana	Terlaksanannya kegiatan sesuai SOP	x		X		x	x	x	x
				Penyusunan SOP tentang patroli bersama	Terlaksanannya kegiatan sesuai SOP	x							

No	Strategi	Program	Sub-Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Rencana Jangka Menengah (RJM)							
						I (2014-2019)					II (2019-2024)	III (2024-2029)	IV (2029-2034)
						1	2	3	4	5			
				Penyusunan SOP monitoring sosio-ekonomi	Terlaksanannya kegiatan sesuai SOP		x						
				Penyusunan SOP monitoring biofisik	Terlaksanannya kegiatan sesuai SOP		x						
				Penyusunan SOP pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan	Terlaksanannya kegiatan sesuai SOP	x							
				Penyusunan SOP tentang pelaksanaan kegiatan budidaya	Terlaksanannya kegiatan sesuai SOP	x							
				Penyusunan SOP tentang pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap	Terlaksanannya kegiatan sesuai SOP	x							
		Penatakelola-an kawasan	Penataan batas kawasan	Rekonstruksi batas luar kawasan	Meningkatnya pengetahuan dan kepatuhan masyarakat luas	x					x	x	x
				Rekonstruksi tata batas zonasi	Meningkatnya pengetahuan dan kepatuhan masyarakat luas	x					x	x	x
				Pembuatan papan informasi batas kawasan dan zonasi	Meningkatnya pemahaman arti penting kawasan konservasi	x		x		x	x	x	x

No	Strategi	Program	Sub-Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Rencana Jangka Menengah (RJM)							
						I (2014-2019)					II (2019-2024)	III (2024-2029)	IV (2029-2034)
						1	2	3	4	5			
				Evaluasi zonasi (setiap lima tahun)	Adanya Efektivitas zonasi kawasan					x	x	x	x
			Pembuatan rencana pengelolaan kawasan	Pembuatan dan finalisasi rencana pengelolaan jangka panjang (20 tahun) TWP Laut Banda	Buku pengelolaan kawasan	x							
				Pembuatan rencana pengelolaan jangka menengah (5 tahun) TWP Laut Banda	Buku pengelolaan kawasan	x					x	x	x
				Pembuatan rencana kerja tahunan TWP Laut Banda	Berjalannya rencana pengelolaan jangka pendek	x	x	X	x	x	x	x	x
			Pengembangan database yang komprehensif	Pembuatan Profile TWP Laut Banda dan pulau-pulau disekitarnya di dalam gugus kepulauan Banda	Data dan informasi terbaru								
				Pembuatan data webase yang mudah diakses dan update	Data dan informasi terbaru								

No	Strategi	Program	Sub-Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Rencana Jangka Menengah (RJM)							
						I (2014-2019)					II (2019-2024)	III (2024-2029)	IV (2029-2034)
						1	2	3	4	5			
				Pembuatan atlas sumberdaya pesisir di TWP Laut Banda dan kepulauan sekitarnya di dalam gugus kepulauan Banda	Data dan informasi terbaru								
		Pengembangan kemitraan atau kolaborasi pengelolaan	Kerjasama dengan pihak lain untuk program monitoring sumberdaya alam	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, LIPI, LSM untuk melaksanakan monitoring ekosistem penting pesisir terumbu karang, ikan, mangrove dan padang lamun	Data dan informasi terbaru	x	x	X	x	x	x	x	x
				Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan LSM untuk program monitoring sosial ekonomi	Data dan informasi terbaru	x	x	X	x	x	x	x	x
			Pembentukan dan penguatan tim konservasi laut Banda	Koordinasi rutin dengan stakeholder	Adanya sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Strategi	Program	Sub-Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Rencana Jangka Menengah (RJM)								
						I (2014-2019)					II (2019-2024)	III (2024-2029)	IV (2029-2034)	
						1	2	3	4	5				
			Pembentukan mekanisme pengelolaan kolaborasi	Penetapan mekanisme pengelolaan kolaborasi	Meningkatnya peran serta pihak terkait dalam pengelolaan kawasan			X	x					
		Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan	Pembuatan konsep pendanaan berkelanjutan untuk TWP Laut Banda	Survey dan assesment terkait potensi income guna pendanaan berkelanjutan TWP Laut Banda	Data dan informasi		x							
				Study mengenai kemauan membayar bagi pengunjung TWP Laut Banda (willingness to pay study)	Data dan informasi									
				Kajian kebijakan terkait biaya masuk TWP Laut Banda	Data dan informasi	x								
				Peningkatan kapasitas di dalam pengelolaan biaya masuk TWP Laut Banda	Data dan informasi									
				Pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung pengumpulan biaya masuk TWP	Tersedianya fasilitas transportasi									

No	Strategi	Program	Sub-Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Rencana Jangka Menengah (RJM)								
						I (2014-2019)					II (2019-2024)	III (2024-2029)	IV (2029-2034)	
						1	2	3	4	5				
				Laut Banda										
		Monitoring dan Evaluasi	Program monitoring	Monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP	Tercapainya sasaran kegiatan	x	x	X	x	x	x	x	x	
			Program Evaluasi	Evaluasi efektivitas Pengelolaan	Pengelolaan kawasan lebih terarah sesuai panduan teknis E-KKP3K	x	x	X	x	x	x	x	x	
				Evaluasi kelembagaan	Kuatnya posisi otoritas pengelola	x	x	X	x	x	x	x	x	
2	Strategi Penguatan Pengelolaan Sumberdaya Kawasan	Perlindungan habitat dan populasi ikan	Program perlindungan habitat dan populasi ikan	Monitoring terumbu karang dan ikan	Data dan informasi	x	x	X	x	x	x	x	x	
				Pembentukan tim patroli bersama dan SOP patrol	Menurunnya tingkat pelanggaran	x	x	X	x	x	x	x	x	x
				Pengadaan sarana dan prasarana guna pelaksanaan patroli, monitoring habitat/ikan, penyuluhan, pelampung tambat (mooring buoy)	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang zonasi dan peraturannya		x							

No	Strategi	Program	Sub-Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Rencana Jangka Menengah (RJM)								
						I (2014-2019)					II (2019-2024)	III (2024-2029)	IV (2029-2034)	
						1	2	3	4	5				
		Rehabilitasi habitat dan populasi ikan	Rehabilitasi habitat	Rehabilitasi terumbu karang	Data dan informasi	x	x	X	x	x	x	x	x	
				Rehabilitasi padang lamun	Data dan informasi			x		x	x	x	x	x
		Penelitian dan pengembangan	Monitoring sumberdaya alam dan sosial ekonomi masyarakat	Monitoring ekosistem terumbu karang	Data dan informasi terbaru	x		X		x	x	x	x	
				Monitoring ekosistem padang lamun	Data dan informasi terbaru		x		x		x	x	x	x
				Monitoring Spawning Agregation Site (SPAGs) for fish	Data dan informasi terbaru		x		x					
				Monitoring Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Laut di TWP Laut Banda (Sosial)	Data dan informasi terbaru									
				Monitoring Persepsi para pihak terkait pengelolaan TWP Laut Banda (Sosial)	Data dan informasi terbaru	x		x		x	x	x	x	x

No	Strategi	Program	Sub-Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Rencana Jangka Menengah (RJM)								
						I (2014-2019)					II (2019-2024)	III (2024-2029)	IV (2029-2034)	
						1	2	3	4	5				
				Monitoring spesies kunci di TWP Laut Banda seperti Napoleon, Setasean, Hiu dan Penyu	Data dan informasi terbaru	x	x				x	x	x	
3	Strategi Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pengembangan mata pencaharian alternatif yang berwawasan konservasi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	x	x	X	x	x	x	x	x	
				Pengembangan koperasi simpan pinjam atau serba guna	Meningkatnya jumlah keanggotaan koperasi		x		x		x	x	x	
			Peningkatan kesadaran masyarakat	Kampanye penyadaran terkait konservasi laut	Meningkatnya kesadaran masyarakat luas	x	x	X	x	x	x	x	x	x
				Pembuatan berbagai media penyuluhan (poster, film, lembar informasi)	Meningkatnya kesadaran masyarakat luas	x		X		x	x	x	x	x
				Pembuatan pusat informasi pariwisata bahari	Meningkatnya kesadaran masyarakat luas	x					x	x	x	

No	Strategi	Program	Sub-Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Rencana Jangka Menengah (RJM)							
						I (2014-2019)					II (2019-2024)	III (2024-2029)	IV (2029-2034)
						1	2	3	4	5			
		Pelestarian adat dan budaya	Pelestarian kearifan lokal terkait pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut	Penguatan sistim sasi dan pengelolaan pesisir dan laut berbasis lokal (LMMA)	Meningkatnya penerimaan dan kepatuhan masyarakat	x	x	X					

BAB VI PENUTUP

Rencana Pengelolaan dan Zonasi TWP Laut Banda di Provinsi Maluku Tahun 2014-2034 merupakan dokumen yang memuat kebijakan pengelolaan TWP Laut Banda di Provinsi Maluku, yang meliputi visi dan misi, tujuan dan sasaran pengelolaan, dan strategi pengelolaan untuk mengarahkan dan mengendalikan program dan kegiatan pengelolaan TWP Laut Banda di Provinsi Maluku. Rencana Pengelolaan dan Zonasi TWP Laut Banda di Provinsi Maluku merupakan acuan untuk menyusun rencana kerja tahunan oleh Satuan Organisasi Unit Pengelola TWP Laut Banda di Provinsi Maluku.

Untuk itu, semua pihak yang terkait dalam pengelolaan TWP Laut Banda di Provinsi Maluku diharapkan mendukung Rencana Pengelolaan TWP Laut Banda di Provinsi Maluku secara partisipatif.

Mengingat pengelolaan TWP Laut Banda di Provinsi Maluku bersifat dinamis dan adaptif, maka Rencana Pengelolaan TWP Laut Banda di Provinsi Maluku dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sekali.

Namun demikian, peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana skala besar, dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang, dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

